

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN SISTEM *E-VOTING* PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SISTEM
E-VOTING BRAZIL**



OLEH

**NURUL KHALIFAH
NIM: 2020203874235008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS KESIAPAN SISTEM *E-VOTING* PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SISTEM
E-VOTING BRAZIL**



OLEH

**NURUL KHALIFAH
NIM: 2020203874235008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kesiapan Sistem *E-voting* pada
 Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi
 Perbandingan dengan Sistem *E-voting* Brazil

Nama Mahasiswa : Nurul Khalifah

Nomor Induk Mahasiswa : 202020387435008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1850 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H

NIP : 1964123 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H

NIP : 19 9 01101 2020 12 1 017



Mengetahui:
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,




 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PEMGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kesiapan Sistem *E-voting* pada
 Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi
 Perbandingan dengan Sistem *E-voting* Brazil

Nama Mahasiswa : Nurul Khalifah

Nomor Induk Mahasiswa : 202020387435008

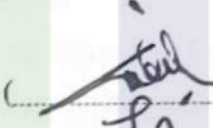
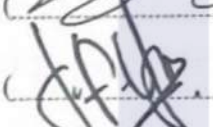
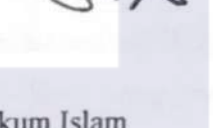
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1850 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 28 November 2024

Disahkan oleh

Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H	(Ketua)	()
Hasanuddin Hasim, M.H	(Sekretaris)	()
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H	(Anggota)	()
Dirga Achmad, M.H	(Anggota)	()

Mengetahui:
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,



()
 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Yulianti dan Ayahanda tercinta Tamsul, atas segala doa dan usaha yang dilakukan tanpa kenal waktu dan lelah demi memberikan yang terbaik dari yang terbaik kepada anak-anaknya. Serta adik-adik tersayang Nurul Aulia Ramadhany, Muhammad Aqil Ghibran, Liyana Zahira, Adiba Azzahra Tamsul, dan Chayra Nadhifa Tamsul yang menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H selaku dosen pembimbing utama dan bapak Hasanuddin Hasim selaku dosen pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare atas kerja kerasnya dalam mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara atas pengabdianya dalam meningkatkan kualitas prodi.

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat kuliah penulis atas segala kebersamaan yang selalu menghasilkan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi penulis.
7. Sahabat SMA penulis atas waktu yang selalu diusahakan untuk saling kebersamaan sampai saat ini.
8. Sahabat KKN 34 Posko 71 Desa Mampu atas segala momen yang dibuat bersama.
9. Penulis sendiri atas keberaniannya dalam mengambil judul ini, yang pada awalnya menimbulkan keraguan. Terima kasih karena telah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Desember 2024

5 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis



Nurul Khalifah

NIM. 2020203874235008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Khalifah

NIM : 2020203874235008

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 5 Mei 2002

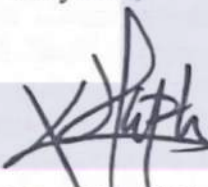
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Kesiapan Sistem *E-Voting* pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem *E-Voting* Brazil

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Desember 2024
Penyusun,



Nurul Khalifah
NIM. 2020203874235008

ABSTRAK

Nurul Khalifah. *Analisis Kesiapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem E-Voting Brazil* (dibimbing oleh H. Sudirman, L. dan Hasanuddin Hasim).

Pelaksanaan pemilu menggunakan sistem konvensional masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kecurangan yang sering dilakukan melalui manipulasi kertas suara, dan masalah lain yang ditimbulkan oleh *human error*. Sistem *e-voting* sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam menjalankan proses pemilu dapat menjadi solusi untuk menggantikan sistem konvensional yang digunakan saat ini. Pada dasarnya, Indonesia sudah menerapkan sistem *e-voting*, namun hanya pada tingkat pemilihan kepala desa. Untuk menerapkan sistem *e-voting* pada tingkat pemilu, Indonesia bisa melakukan studi terhadap negara Brazil yang sukses menerapkan sistem *e-voting* pada tingkat pemilu. Islam sendiri juga memandang sistem *e-voting* sebagai inovasi modern yang sejalan dengan semangat musyawarah. Kajian mengenai sistem *e-voting* termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah* yang mengatur pola hubungan masyarakat dan pemerintah melalui undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan sistem *e-voting* di Indonesia berdasarkan studi terhadap sistem *e-voting* Brazil.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah lainnya, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Brazil dilakukan berdasarkan asas wajib, langsung, rahasia, universal, bebas, dan adil. Sementara itu, kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu memiliki kendala pada mesin *e-voting* yang digunakan saat ini, yaitu pada laptop dan komputer layar sentuh. Alat yang digunakan tersebut memerlukan listrik sebagai penunjang untuk beroperasi, sedangkan di Indonesia sendiri suplai listrik tidak merata terutama di daerah terpencil. Di samping itu, dalam kajian *siyasah dusturiyah*, sistem *e-voting* dapat dianggap sejalan dengan hukum syariah apabila memenuhi prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan amanah, serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).

Kata Kunci: Kesiapan, Sistem *E-Voting*, Pemilu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PEMGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
G. Landasan Teori	18
H. Kerangka Pikir.....	30
I. Metode Penelitian.....	31

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM <i>E-VOTING</i> PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI BRAZIL	34
A. Hukum Pemilu di Brazil.....	34
B. Sistem <i>E-Voting</i> di Brazil	39
C. Tantangan Pelaksanaan Pemilu Menggunakan Sistem <i>E-Voting</i> di Brazil.....	47
BAB III KESIAPAN SISTEM <i>E-VOTING</i> PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA.....	49
A. Hukum Pemilu di Indonesia.....	49
B. Sistem <i>E-Voting</i> di Indonesia	52
C. Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem <i>E-Voting</i> pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	63
BAB IV PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PENERAPAN SISTEM <i>E-VOTING</i> PADA PENYELENGGARAAN PEMILU.....	69
A. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	69
B. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	71
C. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	76
D. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Penerapan Sistem <i>E-Voting</i> pada Penyelenggaraan Pemilu	77
BAB V PENUTUP.....	83
Kesimpulan	83
Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbedaan Penggunaan Teknologi pada Negara yang Mengimplementasikan <i>E-Voting</i> secara Penuh	5



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.2	Bagan Kerangka Pikir	30
2.1	Bagan Penyelenggara Pemilu di Brazil	38
2.2	Panel Kontrol Untuk Petugas TPS	43
2.3	Panel Pemungutan Suara Untuk Pemilih	43
3.1	Laptop dan Pembaca <i>E-KTP</i>	59
3.2	Monitor Layar Sentuh, Pembaca <i>Smartcard</i> , Alat Audit, dan Aksesibilitas Disabilitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Undang-undang Nomor 9.504 Tahun 30 September 1997	Terlampir



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اُ	Dhomma	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِ	`Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*). contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul Jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*),

Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasra l-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
Sm	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

من	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : editor Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan Indonesia sepenuhnya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian pada Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa konsep negara Indonesia adalah negara hukum atau *reechtsstaat* dengan prinsip “*the rule of law*” yang menekankan bahwa pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.¹ Mengingat setiap kebijakan yang akan diambil nantinya akan kembali kepada rakyat selaku pemegang penuh kedaulatan. Semua hal ini sejalan dengan cita-cita demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebagai negara hukum yang demokratis, maka pemenuhan kedaulatan rakyat merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, pemilu atau pemilihan umum hadir sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan martabat demokrasi pada konsep negara hukum Indonesia. Pemilu sendiri merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara, memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai pemimpin ditingkat provinsi, kabupaten dan kota. Agar pemilu berjalan dengan demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

¹ Hasanuddin Hasim dkk., “Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia,” JURNAL SULTAN 1, no. 1 (2022): 44–51, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3217>. h. 44

Pemerintah dalam membuat kebijakan negara harus berdasarkan kepentingan rakyat, ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah sebagai wakil rakyat kepada rakyat yang memilihnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara penganut sistem demokrasi akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, karena pemilu yang demokratis akan mencegah kekuasaan negara lepas dari kendali rakyat dan mendorong pemerintah untuk bertanggungjawab kepada rakyat.²

Praktik pelaksanaan pemilu saat ini menggunakan metode konvensional. Metode tersebut dilakukan dengan tahapan, pertama, pada hari pemilihan berlangsung, warga yang memiliki hak pilih datang ke TPS melakukan pendaftaran menggunakan KTP dan C-Formulir. Kedua, warga yang telah terverifikasi sebagai pemilih melakukan pemungutan suara di bilik suara dengan mencoblos kandidat pilihannya pada kertas suara yang telah diberikan, setelah selesai, pemilih kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Ketiga, setelah proses pemungutan suara selesai, dilakukan proses perhitungan suara secara berjenjang oleh petugas pemilihan dengan disaksikan oleh warga setempat.

Tiada gading yang tak retak, praktik pemilu dengan menggunakan metode konvensional dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti surat suara sudah tercoblos, surat suara hilang, politik uang, dan lainnya. Steven F. Huefner berkata bahwa kecurangan pemilu dapat dilakukan oleh kandidat yang tidak jujur dan jelas mempunyai motif untuk melakukan hal tersebut jika mereka menemukan peluang untuk melakukannya. Hal ini juga dapat dilakukan oleh petugas pemungutan suara atau penyelenggara pemilu lainnya yang biasanya memiliki peluang lebih besar. Kecurangan pemilu juga dapat dilakukan oleh individu-individu terisolasi atau

² Akhmad Zaki Yamani, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia" (Universitas Islam Malang, 2023). h. 3-4

kelompok-kelompok terorganisir dari kalangan pemilih yang motif dan peluangnya dilemahkan.

Permasalahan lainnya dalam praktik pemilu dengan menggunakan metode konvensional adalah adanya kesalahan manusia (*human error*). Hal ini meliputi kacaunya daftar pemilih, tingginya jumlah suara tidak sah akibat banyak pemilih yang salah memberikan tanda saat proses pemungutan suara, lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari berbagai daerah, serta besarnya anggaran yang dianggap mencerminkan ketidakefektifan pelaksanaan pemilu. Akibatnya, pesta demokrasi tidak dapat berjalan secara optimal, yang pada akhirnya berimplikasi pada menurunnya tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu.³

Penggunaan metode sistem *electronic voting* atau *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilu secara umum dapat menjadi solusi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pelopor dalam pengembangan *e-voting* di Indonesia mendefinisikan *electronic voting* (*e-voting*) sebagai suatu metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Secara lebih menyeluruh, BPPT menjelaskan bahwa sistem *e-voting* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital dalam pembuatan surat suara, proses pemungutan suara, perhitungan suara, pengiriman serta penayangan hasil perolehan suara, hingga pemeliharaan dan penciptaan jejak audit.⁴

Dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang digelar secara hibrida dari Bali pada Rabu (23/3), Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengusulkan penerapan *e-voting* dalam Pemilu

³ Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, dan Adit Nurrafi, "Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0.," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 1 (2020): 141–62, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720>. h. 143-144

⁴ Arianaldi Kaspari, "Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat" (Universitas Andalas, 2023). h. 13

2024. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses politik yang sah, termasuk dalam tahapan pemilihan, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, serta pengiriman dan rekapitulasi hasil pemilu.⁵

Penerapan sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah manfaat antara lain mempercepat proses perhitungan suara, mengurangi biaya pencetakan surat suara, dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Selain itu, sistem ini juga dapat mengantisipasi berbagai kendala seperti rusaknya kotak suara selama distribusi, kesalahan akibat *human error*, serta lambatnya proses tabulasi data hasil perhitungan suara dari berbagai daerah.

Penggunaan sistem *e-voting* juga dapat menjadi solusi untuk menghindari kelelahan petugas pemilu yang berakibat fatal, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Berdasarkan data, sebanyak 554 petugas baik dari KPU, Bawaslu dan Polri meninggal dunia, dengan 440 di antaranya berasal dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sementara 3,788 lainnya jatuh sakit. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengusulkan agar Pemilu 2024 menerapkan sistem *e-voting* guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses pemungutan suara.⁶

Pada beberapa dekade terakhir, banyak negara di seluruh dunia, termasuk India, Brazil, Amerika Serikat, Belgia, dan lainnya, telah mengadopsi sistem *e-voting*. Risnanto menguraikan hasil penelitiannya mengenai pengalaman negara-negara tersebut ketika menerapkan sistem *e-voting* sebagai berikut:

⁵ D.Dj. Kliwanto, "E-voting Dari Kacamata Regulasi dan Keamanan Siber," ANTARA, 26 Maret 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2783521/e-voting-dari-kacamata-regulasi-dan-keamanan-siber>

⁶ Andri Setiawan, "Penerapan Sistem E-voting Pada Era Society 5.0 Sebagai Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009," *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023): 49–72, <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.217>. h. 51-52

1. Mengimplementasikan *e-voting* secara penuh: India, Brazil, Filipina, dan Estonia.
2. Mengimplementasikan *e-voting* secara parsial: Argentina, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Jepang, Meksiko, Prancis dan Peru.
3. Membatalkan implementasi *e-voting* setelah berbagai uji coba: Australia, Kosta Rika, Finlandia, Guatemala, Inggris, Irlandia, Italia, Kazakhstan, dan Norwegia.
4. Menghentikan atau tidak melanjutkan implementasi *e-voting*: Belanda, Jerman, dan Paraguay.
5. Sedang proses uji coba *e-voting*: Bangladesh, Bhutan, Ekuador, Mongolia, Swiss, Nepal, dan Indonesia.

Di antara negara-negara yang telah menerapkan *e-voting* secara menyeluruh, terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaan teknologi, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Penggunaan Teknologi pada Negara yang Mengimplementasikan *E-Voting* secara Penuh

Teknologi	Negara			
	India	Brazil	Filipina	Estonia
Perangkat	<i>EVM</i> (<i>Electronic Voting Machine</i>)	<i>GX-1</i> <i>Integrated Processor</i>	PCOS	Tidak ada (<i>Gadget voters/internet voting</i>)
<i>Paper Audit Trail</i>	<i>VVPAT Machine</i>	Tidak	Surat suara konvensional	Tanda terima digital
Koneksi Internet	Tidak	Tidak	Ya (hanya untuk perhitungan)	Ya
<i>Wi-Fi/USB</i>	Tidak	Tidak	Ya (hanya untuk perhitungan)	Ya
<i>Power</i>	Baterai	Baterai	Baterai dan listrik	Baterai dan listrik

Hasil	Sukses tanpa masalah	Sukses tanpa masalah	Sukses tapi dengan banyak komen/klaim negatif	Sukses tapi dengan banyak komen/klaim negatif
-------	----------------------	----------------------	---	---

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan *e-voting* di India dan Brazil berjalan lebih baik dibandingkan dengan di Filipina dan Estonia.⁷ Melihat perbedaan di atas, penelitian ini memilih Brazil sebagai perbandingan. Brazil dipilih karena mempunyai kesamaan sistem hukum dengan Indonesia yaitu sama-sama menggunakan sistem hukum *civil law* yang berdasar pada hukum tertulis atau kodifikasi hukum dimana aturan-aturan hukum disusun dalam bentuk undang-undang yang menjadi sumber hukum utama. Sama dengan Indonesia, Brazil juga merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana presiden dipilih melalui pemilihan umum yang langsung oleh rakyat. Selain itu, Brazil juga termasuk ke dalam daftar negara dengan populasi penduduk terbesar bersama Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 278.696.200 berada pada posisi ke empat dan Brazil dengan jumlah penduduk sebanyak 221.289.000 berada pada posisi ke tujuh.⁸

Menurut ACE Project, pada kenyataannya Brazil sudah jauh lebih lama mengimplementasikan metode *e-voting*, yaitu ketika pemilihan Mahkamah Agung Brazil yang pada saat itu dilakukan dengan menggunakan komputer, tepatnya pada tahun 1985. Setahun setelahnya, pada 1986, pemerintah Brazil melakukan *feasibility study* terkait penggunaan teknologi *e-voting*. Kemudian, pada 1996, sistem *e-voting* mulai diperkenalkan pada pemilu lokal di Kota Santa Catarina. Dua tahun setelahnya, pada 1998, metode ini mulai digunakan secara nasional sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu. Dan sejak 2006 hingga saat ini, Brazil terus mengembangkan konsep demokrasi berbasis *e-voting* untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemilu.

⁷ Slamet Risnanto dan Yahaya Abd Rahum, "E-voting: Technology Requirements Mapping," TEM Journal 11, no. 3 (Agustus 2022): 1282–90, <https://doi.org/10.18421/TEM113-37>. h. 1284-1285

⁸ "Daftar negara menurut jumlah penduduk," dalam WIKIPEDIA, 2024.

Berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu, sebenarnya telah banyak dibahas oleh para peneliti. Di antaranya ada Karmanis, dimana dalam penelitian komparasinya, dia sampai pada kesimpulan bahwa sistem *e-voting* dapat meningkatkan keefektifan serta keefisienan proses pemilihan.⁹ Selanjutnya ada Wijaya, yang dimana melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dia menemukan dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan *e-voting*.¹⁰ Sebagai tambahan, Dewanti dalam studi reflektifnya juga berkesimpulan bahwa *e-voting* dalam pemilu dapat mempercepat proses rekapitulasi serta mencegah petugas lelah karena beban kerja yang berat.¹¹

Kesiapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sendiri yang sebenarnya telah ada yang menerapkan sistem *e-voting*. Penggunaan sistem *e-voting* dibolehkan asal memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang terlampir pada amar Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, yaitu:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan kewenangannya, telah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

⁹ Karmanis, "Electronic-Voting (E-voting) dan Pemilihan Umum," *Mimbar Administrasi* 18, no. 2 (2021): 11–24, <http://dx.doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526>. h. 12

¹⁰ Junior Hendri Wijaya, Achmad Zulfikar, dan Iman Amanda Permatasari, "Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (2019): 51–59, <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>. h. 58

¹¹ Mhd. Ansor Lubis, Wenggedes Frensh, dan Fitri Yanni Dewi Siregar, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>. h. 46

Daerah. Keputusan yang dihasilkan membahas aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berbasis teknologi. Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 memuat pertimbangan Mahkamah terkait pengujian konstiusionalitas Pasal 88 dalam undang-undang tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *“Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”*.

Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”*. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa *“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*. Dalam hal ini, pemohon berargumen bahwa Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi hambatan dalam penerapan metode pemungutan suara berbasis teknologi informasi. Seharusnya, ketentuan tersebut mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui sistem *e-voting*. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan agar *e-voting* disahkan sebagai bentuk transformasi dari sistem pemilihan umum konvensional.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan, maka dilakukan perubahan kebijakan pilkada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Ketentuan pilkada dalam undang-undang tersebut dicantumkan dalam Pasal 85 yang berbunyi:

- (1) *Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
 - a) *Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
 - b) *memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*

- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU*

Selanjutnya, perubahan pada undang-undang Pilkada yang kedua, lebih tepatnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pasal tersebut juga mengalami perubahan, sehingga di antara Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 ayat, yakni Ayat (2a) dan Ayat (2b) dengan demikian, Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
 - a) *memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
 - b) *memberi suara melalui peralatan*
- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2a) *Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi Infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.*
 - (2b) *Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).¹²

Dengan berlandaskan pada aturan-aturan di atas, hingga saat ini lebih dari 2000 desa yang tersebar di 28 kabupaten di 15 provinsi telah berhasil mengimplementasikan sistem *e-voting*. Beberapa daerah tersebut tercatat sebagai berikut:

- Tahun 2013: Boyolali 7 Desa, Jembrana 2 Desa, Musia Rawas 2 Desa.
- Tahun 2014: Musi Rawas 95 Desa.
- Tahun 2015: Bantaeng 9 Desa, Boalemo 30 Desa, Banyuasin 160 Desa, Empat Lawang 101 Desa.
- Tahun 2016: Bantaeng 9 Desa, Boalemo 30 Desa, Banyuasin 160 Desa, Batang Hari 32 Desa.
- Tahun 2017: Bogor 1 Desa, Agam 28 Desa, Boyolali 5 Desa, Boalemo 17 Desa, Bantaeng 25 Desa, Banyuasin 45 Desa, Mempawah 20 Desa, Musi Rawas 16 Desa, Indragiri Hulu 1 Desa.
- Tahun 2018: Bogor 1 Desa, Sidoarjo 14 Desa, Luwu Utara 3 Desa, Oku Timur 40 Desa, Pemalang 172 Desa, Batanghari 15 Desa, Sarolangun 39 Desa.
- Tahun 2019: Agam 35 Desa, Boyolali 22 Desa, Lumajang 2 Desa, Situbondo 5 Desa, Boalemo 17 Desa, Magetan 18 Desa, Oku Timur 8 Desa, Bantaeng 16 Desa, Indragiri Hulu 3 Desa, Toraja Utara 87 Desa.
- Tahun 2020: Sidoarjo, Sleman 49 Desa, Banyuasin 80 Desa, Batanghari 60 Desa, Sarolangun 62 Desa, Musi Rawas 42 Desa, Mempawah 30 Desa.
- Tahun 2021: Barito Kuala 43 Desa, Sleman 35 Desa, Bantaeng 9 Desa, Indragiri Hilir 1 Desa.

¹² Sandy Prayoga, "Penggunaan E-voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022," *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 160–75. h. 167-168

- Tahun 2022: Bulukumba 1 Desa, Boalemo 16 Desa, Lampung Tengah 5 Desa, Pesawaran 1 Desa.
- Tahun 2023: Malinau 2 Desa, Mempawah 19 Desa, Agam 38 Desa, Bantaeng 25 Desa.

Keunggulan teknologi *e-voting* secara nyata dirasakan dalam setiap pelaksanaan pilkades, terbukti dengan penerapannya yang terus eberlanjut di berbagai kabupaten seperti Banyuasin, Agam, dan Bantaeng. Kabupaten-kabupaten tersebut kembali menyelenggarakan pilkades berbasis elektronik pada tahun ini. Rizqi Ayunda Pratama menegaskan: “Melalui dukungan Pemerintah dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/1115/BPD pada 8 Maret 2021 tentang Arahan Penerapan Pemilihan Kepala Desa melalui *e-voting*, kami yakin dan siap untuk meluaskan penerapan *e-voting* di seluruh wilayah Indonesia sehingga tercipta penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel”.¹³

Islam sendiri juga memandang sistem *e-voting* sebagai inovasi modern yang sejalan dengan semangat musyawarah dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah salah satu ilmu hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bertatanegara menetapkan tujuan utamanya adalah kemaslahatan dalam bermasyarakat.¹⁴ Secara garis besar ruang lingkup fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi (*siyasah maliyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka kajian mengenai sistem *e-voting* termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah* yang mengatur pola hubungan masyarakat dan pemerintah melalui undang-undang khususnya mengenai bagaimana pemilihan suatu pemimpin. Penggunaan sistem *e-voting* yang baik dan benar pada

¹³ Humas PT INTI (Persero), “Sukses Rampungkan Pilkades Elektronik pada Ribuan Desa, INTI Group Jadi Satu-Satunya Pemegang Legalitas Sistem e-voting,” INTI, 14 Juni 2023, <https://www.inti.co.id/?p=12076>.

¹⁴ Azzahrah, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.”

pemilu akan memberikan manfaat yang signifikan bagi ketatanegaraan suatu negara, hal ini searah dengan tujuan kemaslahatan dari fiqh siyasah.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu memiliki nilai penting dalam memahami peran pemerintah untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesiapan Sistem *E-Voting* pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem *E-Voting* Brazil”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Brazil?
2. Bagaimana kesiapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Brazil!
2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia!
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam diskusi-diskusi intelektual mahasiswa, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum berkaitan

dengan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik yang sama dalam mencari referensi atau sumber yang dapat diandalkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan *e-voting*.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi salah satu syarat untuk saya memperoleh gelar sarjana dalam Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negara Parepare.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Sistem *E-Voting*

Sistem *e-voting* terdiri dari dua istilah, yaitu sistem dan *e-voting*. Istilah sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya kumpulan elemen yang saling berhubungan secara teratur sehingga membentuk totalitas. Sedangkan *e-voting* merupakan singkatan dari istilah elektronik dan voting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elektronik artinya alat yang dibentuk dengan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat yang dibuat atau bekerja atas dasar elektronik, dan voting artinya pemungutan suara karena tidak tercapai kata mufakat. Namun, voting yang dimaksud dalam istilah ini mengarah pada penentuan pemimpin dengan melakukan pemilihan terkait siapa yang sangat layak untuk mewakili mereka, sehingga pengertian voting yang dimaksud ialah salah satu cara pengambilan keputusan atau perumusan masalah dengan cara pemungutan suara terbanyak.

Sistem *e-voting* didefinisikan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai sistem yang menggunakan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara,

menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.¹⁵

2. Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses dalam sistem demokratis yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan. Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.¹⁶

Pengertian pemilu lebih jelasnya tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut *“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*¹⁷

3. Studi Perbandingan

Studi perbandingan memiliki dua susunan kata, yaitu “studi” dan “perbandingan”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “studi” ialah sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan “perbandingan” ialah ilmu yang membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda. Pada penelitian, studi komparatif biasanya digunakan dalam perbandingan pada persamaan

¹⁵ Romadhona Kusuma Yudha, “Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem E-voting Di Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 1, no. 1 (2021): 41–49. h. 44

¹⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

¹⁷ “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (t.t.).

ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat objek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.¹⁸

Mohammad Nasir, menguraikan pengertian studi komparatif sebagai bagian dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban mendasar terkait sebab-akibat dengan menganalisis berbagai faktor penyebab yang memicu atau menyebabkan munculnya suatu fenomena tertentu. Menurut Sugiyono, studi perbandingan ialah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada dua sampel atau lebih pada titik waktu yang berbeda. Dari dua pengertian ahli di atas, maka studi perbandingan dapat disimpulkan sebagai jenis penelitian dimana dua variabel atau lebih dibandingkan untuk menemukan jawaban atau bukti tentang apakah ada perbedaan antara subjek yang diteliti atau tidak.¹⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ari Wibowo, pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Penerapan *E-Voting* dalam Rangka Transformasi Digital pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pemilihan umum yang seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti waktu yang terbatas, biaya, dan logistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, modernisasi sistem pemilu Indonesia berfokus pada transformasi digital. Salah satu wujud dari transformasi digital ini adalah *e-voting*, yaitu pemanfaatan teknologi elektronik dalam setiap proses pada tahapan pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep, manfaat, dan hambatan dalam pengimplementasian *e-voting* dengan melihat pengalaman negara lain yang telah menerapkan *e-voting*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan analisis komparatif

¹⁸ Khurin Ainun Azmi, “Studi Komparatif Kitab Syarah al-Arba’in an-Nawawiyah karya Syaikh al-Usaimin dengan Kitab Syarah Mukhtar al-Ahadis Karya KH. Moch. Anwar dan Dkk Dalam Telaah Kitab Hadis” (IAIN Kudus, 2022). h. 8

¹⁹ Gianita Syahada, “Studi Komparatif Terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

terhadap pengalaman negara lain dalam mengimplementasikan *e-voting*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) *e-voting* memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi pemilu; 2) implementasi *e-voting* di Indonesia membutuhkan perhatian serius terhadap aspek hukum dan regulasi; serta 3) terdapat tantangan teknis dalam implementasinya, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, pelatihan personel, keamanan suara, dan efektivitas komunikasi.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas implementasi sistem *e-voting* pada pemilu. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu jenis penelitian pustaka dengan analisis komparatif terhadap pengalaman negara lain dalam mengimplementasikan *e-voting*. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu hanya sekedar membahas pengalaman negara lain ketika mengimplementasikan *e-voting* dalam pemilu. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya sekedar membahas pengalaman negara lain ketika mengimplementasikan *e-voting* dalam pemilu, tetapi juga akan membahas prosedur pemilu dengan menggunakan sistem *e-voting* dari negara tersebut, yang kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk di adopsi oleh Indonesia.

2. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Andi Rizki Faturrahman, pada tahun 2022 dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah menghadapi beberapa tantangan, antara lain; kurangnya kesiapan panitia dalam mengawasi kegiatan dan keterbatasan alat *e-voting*. Selain itu, sosialisasi yang tidak merata di

²⁰ Ari Wibowo, “Implementasi Penerapan E-voting dalam Rangka Transformasi Digital pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, November 2023, 15–25. h. 15

masyarakat menyebabkan banyak masyarakat belum memahami cara pemilihan dengan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa masih terhambat oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya peralatan *e-voting*, dan sosialisasi yang kurang efektif.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas sistem pemilihan berbasis *e-voting*. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada panitia penyelenggara pemilihan dan masyarakat pemilih terkait jalannya Pilkades berbasis *e-voting* di desa tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan pengumpulan data hukum terkait sistem *e-voting* untuk diimplementasikan pada pemilu di Indonesia.

3. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Abdul Basid Fuadi, pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Padahal partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan bukti penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Sementara itu, di sisi lain, perkembangan teknologi semakin pesat dengan tujuan utama membantu kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu penerapannya adalah penggunaan teknologi atau disebut dengan sistem *e-*

²¹ Andy Rizki Faturrahman, “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-voting Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022). h. 2

voting dalam sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sistem *e-voting* dalam pemilu serta mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan sistem *e-voting* sebagai pengganti metode konvensional dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-voting* telah sejalan dengan kerangka hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, serta Pasal 85 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilu. Jenis penelitian yang digunakan juga sama, yaitu jenis penelitian normatif. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu melakukan tinjauan yuridis terhadap sistem *e-voting*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan mengkaji prosedur penyelenggaraan pemilu di Brazil yang menggunakan sistem *e-voting* secara penuh, yang kemudian akan dilakukan perbandingan untuk di adopsi oleh Indonesia.

G. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang terbentuk dari kata “*demos*” yang artinya rakyat, dan kata “*kratos*” yang artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan

²² Abdul Basid Fuadi, “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²³

Menurut Hans Kelsen, gagasan demokrasi berawal dari konsep kebebasan yang ada dalam pemikiran manusia. Pada mulanya, istilah "kebebasan" sering dikaitkan dengan makna negatif, yaitu ketiadaan ikatan atau kewajiban. Namun, Hans Kelsen menolak pandangan tersebut. Ia berpendapat bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kebebasan tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai ketiadaan batasan, melainkan sebagai prinsip yang memungkinkan individu menentukan kehendaknya sendiri. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan teori demokrasi menurut Hans Kelsen.²⁴

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hukum demokrasi memiliki peran penting bagi rakyat. Menurutnya, demokrasi merupakan sistem kekuasaan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Secara sederhana, demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang berwenang memerintah dan mewakili mereka. Dalam konteks politik atau secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan keberadaan berbagai partai politik yang bersaing secara bebas serta menjamin kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilihan.

Dalam bukunya *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jimly Asshiddiqie membagi demokrasi ke dalam dua bentuk berdasarkan praktiknya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung diwujudkan melalui referendum, di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Sementara itu, demokrasi tidak langsung, yang

²³ Dwi Novita Ramadhanti, "Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik," *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (2022): 361–66, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>. h. 362

²⁴ Haniefa Hebatullah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Di Indonesia," 2021. h. 3

disebutnya sebagai demokrasi perwakilan, dijalankan melalui lembaga perwakilan yang bertugas mewakili rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.²⁵

Selanjutnya, Prof. Jimly Asshiddiqie menguraikan delapan prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut:²⁶

- a) Jaminan atas kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b) pengakuan serta penghormatan terhadap keberagaman atau pluralitas;
- c) keberadaan aturan yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bersama;
- d) mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan aturan yang disepakati bersama;
- e) pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f) pembatasan kekuasaan melalui sistem pemisahan dan pembagian wewenang;
- g) keberadaan peradilan yang independen, tidak memihak, serta memiliki kewenangan tertinggi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran;
- h) pembentukan lembaga peradilan khusus guna menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintah.

Demokrasi memiliki dua dimensi utama, yaitu: 1) *contention*, yang merujuk pada adanya kompetisi yang bebas bagi para kandidat, dan 2) *participation*, yaitu hak memilih bagi setiap warga negara yang telah dewasa. Dalam sistem demokrasi, keberlangsungan pemerintahan yang baik bergantung pada jaminan konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, negara harus melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi serta menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu,

²⁵ Evi Ardianti, “Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyash” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

²⁶ Luluk Chikmawati, “Perbandingan Konsep Demokrasi antara Jimly Asshiddiqie dan Yusuf Al Qaradhawi” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023). h. 32-33

terciptanya masyarakat yang demokratis juga bergantung pada dukungan rakyat terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, penolakan terhadap kekerasan, serta kemampuan untuk mencari solusi secara damai dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok tertentu.²⁷

Sejak reformasi tahun 1998, demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala menjadi salah satu karakteristik utama, yaitu dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil mereka di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Prinsip transparansi dan akuntabilitas semakin ditekankan, dengan pemerintah yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat serta masyarakat yang aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, memungkinkan warga untuk menyuarakan opini serta mengkritik pemerintah secara terbuka. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama dengan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM yang bertugas melindungi dan mempromosikan hak-hak individu. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta permasalahan dalam sistem hukum. Namun, pemerintah dan masyarakat Indonesia terus berupaya memperkuat demokrasi dengan mengatasi kekurangan yang ada, memperjuangkan keadilan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik.²⁸

²⁷ Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, dan Poppy Belladonna, “Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi ‘Sehat,’” *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 110–23, <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i2.25>. h. 110-111

²⁸ Alifa Ulfiyyati dkk., “Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan,” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–44, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>. h. 438

2. Teori Teknologi Informasi

Teknologi informasi terdiri dari dua kata, yaitu "teknologi" dan "informasi." Teknologi merujuk pada pengembangan serta penerapan berbagai alat, mesin, bahan, dan proses yang bertujuan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan inovasi dalam bentuk alat baru yang diciptakan berdasarkan prinsip dan proses ilmiah. Sementara itu, informasi merupakan sekumpulan data yang saling berkaitan dan telah melalui proses pengolahan yang kompleks. Dengan kata lain, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat.²⁹

Menurut Tata Sutabri, teknologi informasi adalah teknologi yang berfungsi untuk mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, serta memanipulasi data dengan berbagai metode guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat, dan tersedia tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan individu, dunia usaha, maupun lembaga pemerintahan. Selain itu, informasi yang dihasilkan memiliki nilai strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan.³⁰

Menurut Sutarman, teknologi informasi bertujuan untuk mendukung manusia dalam menyelesaikan permasalahan, merangsang kreativitas, serta

²⁹ Muhammad Febryan Hadipratama, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Disiplin Kerja Serta Keadaan Lingkungan Kerja Terhadap Persepsi Kualitas Kinerja Guru Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 03 dan 011 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara)" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022). h. 11

³⁰ Adi Rachmanto dan Yogi Riyan Aditama, "Pengaruh Teknologi Informasi, Kemampuan Pengguna Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)," JEMBA : Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting 2, no. 2 (2022): 74–94, <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7492>. h. 77

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pekerjaan. Teknologi ini memiliki enam fungsi utama, yaitu:³¹

- a. Menangkap (*capture*), teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan;
- b. Mengolah (*processing*), setelah data diterima, teknologi informasi dapat mengolahnya dengan menyusun catatan rinci dari berbagai aktivitas. Misalnya, data yang diperoleh dari perangkat input seperti keyboard, kamera, atau mikrofon akan diproses lebih lanjut melalui berbagai tahapan, seperti konversi, analisis, perhitungan, dan sintesis, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan;
- c. Menghasilkan (*generating*), menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan;
- d. Menyimpan (*storage*), adanya teknologi informasi membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, *hard disk*, *flash dick*, hingga *cloud storage*.
- e. Mencari kembali (*retrievel*), teknologi informasi mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan;
- f. Transmisi (*transmission*), teknologi informasi memudahkan manusia dalam mengirimkan data melalui *bluetooth* atau jaringan internet.

Teknologi informasi merupakan aset yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Semakin canggih teknologi informasi yang dimiliki maka akan semakin baik pula informasi yang didapat.³² Adapun teknologi informasi yang berkualitas harus terdiri dari beberapa komponen yang

³¹ Bayu Ardi Isnanto, "Teknologi Informasi: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Prediksi Masa Depan," *detikedu*, 23 Juli 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6837518/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-contoh-dan-prediksi-masa-depan>.

³² Ni Luh Wayan Cempaka Suandewi Putri, "Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Partisipasi Pengguna, Kinerja Individu, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tegallalang" (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023). h. 22

mendukung. Berikut adalah komponen teknologi informasi yang diuraikan oleh Sutarman:³³

- a. *Hardware* (Perangkat Keras) merupakan kumpulan alat seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer yang berfungsi untuk menerima, memproses, serta menampilkan data dan informasi;
- b. *Software* (Perangkat Lunak) merupakan sekumpulan program komputer yang memungkinkan *hardware* menjalankan pemrosesan data;
- c. *Database* (Basis Data), merupakan sekumpulan *file* yang saling terkait dan terorganisasi, terdiri dari kumpulan rekaman yang menyimpan data beserta hubungan antar data tersebut;
- d. *Network* (Fasilitas Jaringan dan Komunikasi) merupakan sistem yang menghubungkan berbagai perangkat komputer, memungkinkan penggunaan bersama serta pertukaran data secara efisien.
- e. *People* (Orang) merupakan komponen paling penting dalam teknologi informasi, mencakup individu yang mengoperasikan dan memanfaatkan output dari sistem tersebut.

Penerapan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan bagi pengguna, diantaranya:³⁴

- a. Kecepatan (*Speed*), dengan menggunakan teknologi informasi memungkinkan penyelesaian tugas jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual oleh manusia. Misalnya, perhitungan yang kompleks, pencarian kembali data yang tersimpan dalam jumlah banyak, serta pengiriman data antar lokasi dapat diselesaikan dalam hitungan detik.
- b. Konsistensi (*Consistency*), pemrosesan data menggunakan teknologi informasi lebih stabil dan teratur dibandingkan manusia, terutama dalam

³³ Nidisa Utami, “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survei Pada Unit Akuntansi Keuangan Pada Bank BUMN Di Kota Bandung)” (Universitas Komputer Indonesia, 2020). h. 13

³⁴ Eka Kusmayadi, *Pengenalan Teknologi Informasi*, 3 ed. (KAJIAN SOFTWARE, 2021).

tugas yang bersifat berulang. Sementara manusia cenderung sulit menghasilkan sesuatu yang sama persis dalam pekerjaannya, terlebih lagi jika dilakukan secara berulang-ulang.

- c. Ketepatan (*Precision*), teknologi informasi mampu mendeteksi perbedaan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Misalnya, dalam pencantuman angka desimal, sistem dapat diatur untuk menampilkan banyak digit di belakang koma, sehingga meningkatkan tingkat akurasi yang sulit dicapai oleh manusia.
- d. Keandalan (*Reliability*), dalam pencarian informasi, aspek kecepatan, konsistensi, dan ketepatan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Kemungkinan kesalahan akan lebih kecil ketika pekerjaan dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dibandingkan jika hanya mengandalkan tenaga manusia. Oleh karena itu, keandalan ini menjadi faktor penting bagi suatu organisasi.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah terlahir dari keberadaan *fiqh siyasah* dengan menjadi salah satu ruang lingkup kajiannya. Kata *fiqh* sendiri berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang menurut bahasa artinya “paham yang mendalam”. Dalam Al-Qur’an, kata *faqaha* disebutkan sebanyak 20 kali dan 19 kali di antaranya merujuk pada pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. *Fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Sedangkan menurut istilah, *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).”

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh para ulama (*mujtahidin*) dalam menggali hukum-hukum *syara'* untuk dapat diterapkan oleh umat Islam.

Selanjutnya, kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa* yang menurut bahasa artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

Gambaran dari definisi “*fiqh*” dan “*siyasah*” di atas memberikan sebuah kesimpulan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.³⁵

Kata “*dusturiyah*” berasal dari bahasa Persia “*dusturi*”, yang berarti “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Merujuk pada pengertian itu, dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Namun setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Sedangkan menurut istilah, *dusturi* artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Menurut Abu A'la Al-Maududi, “*dusturi*” adalah “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Oleh karena itu, dikatakan bahwa *dusturi* merupakan prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara mana pun, dan ini terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata “*dusturi*” merujuk pada istilah yang sama dengan kata “*constitution*” dalam bahasa

³⁵ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH KONSTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM*, 1 ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

Inggris, atau “undang-undang dasar” dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, konstitusi harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, dan semua hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan.³⁶

Atjep Jazuli menganalisis ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* ialah tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga di dalamnya. Namun karena terlalu luas, maka kajian *siyasah dusturiyah* difokuskan pada bidang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Dalam konstitusi dibahas tentang sumber dan prinsip perundangan-undangan suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah maupun sumber penafsiran. Inti dalam sumber-sumber tersebut adalah peraturan tentang pemerintah dan rakyat. Perumusan konstitusi harus memperhatikan latar belakang dan sejarah dari negara yang bersangkutan, baik dari masyarakatnya, politiknya maupun budayanya, sehingga tercipta undang-undang yang sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat negara tersebut.³⁷

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur urusan umat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Prinsip *siyasah dusturiyah* dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada *nash* (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan pada *Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali, ada enam prinsip dalam *nash*, yaitu 1) tentang kedudukan manusia di bumi, 2) musyawarah dan konsultasi, 3) ketaatan kepada pemimpin, 4) keadilan, 5) persamaan dan kesetaraan, dan 6) hubungan baik antara umat beragama.

³⁶ Beta Utami, “KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h. 47-48

³⁷ Fatmawati, FIKIH SIYASAH, ed. oleh Muhammad Shuhufi (Gowa: Pusaka Almaida, 2015). h. 102

Sedangkan prinsip *Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi sosial masyarakat agar undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Kallaf bahwa yang menjadi dasar perumusan konstitusi dalam prinsip Islam ialah perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum.³⁸

Al-Qur'an sebagai suatu petunjuk bagi manusia, memberikan dasar yang tetap dan abadi bagi semua prinsip etika dan moral yang diperlukan untuk kehidupan ini. Muhammad Asad mengatakan bahwa kehidupan di dunia harus berjalan seimbang sehingga berakhir bahagia di akhirat, untuk itu manusia sebagai individu harus memiliki tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat, dan dalam Al-Qur'an dan hadist dijelaskan secara menyeluruh persoalan bagaimana sebenarnya tingkah laku yang baik tersebut. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal dari Al-Qur'an dan hadist menjadi faktor penentu keselamatan umat manusia di dunia ini dan di akhirat, seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama melalui "Piagam Madinah".

Tujuan utama Piagam Madinah adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, mengatur kehidupan sosial, dan menegakkan pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Piagam ini juga berfungsi sebagai konstitusi yang menjadi dasar sosial dan politik bagi masyarakat Madinah. Para ahli politik menganggapnya sebagai undang-undang dasar pertama dalam sejarah negara Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW.

Setelah wafatnya Nabi, tidak ada konstitusi tertulis yang secara khusus mengatur pemerintahan Islam. Umat Islam menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang tetap menjadi rujukan dari

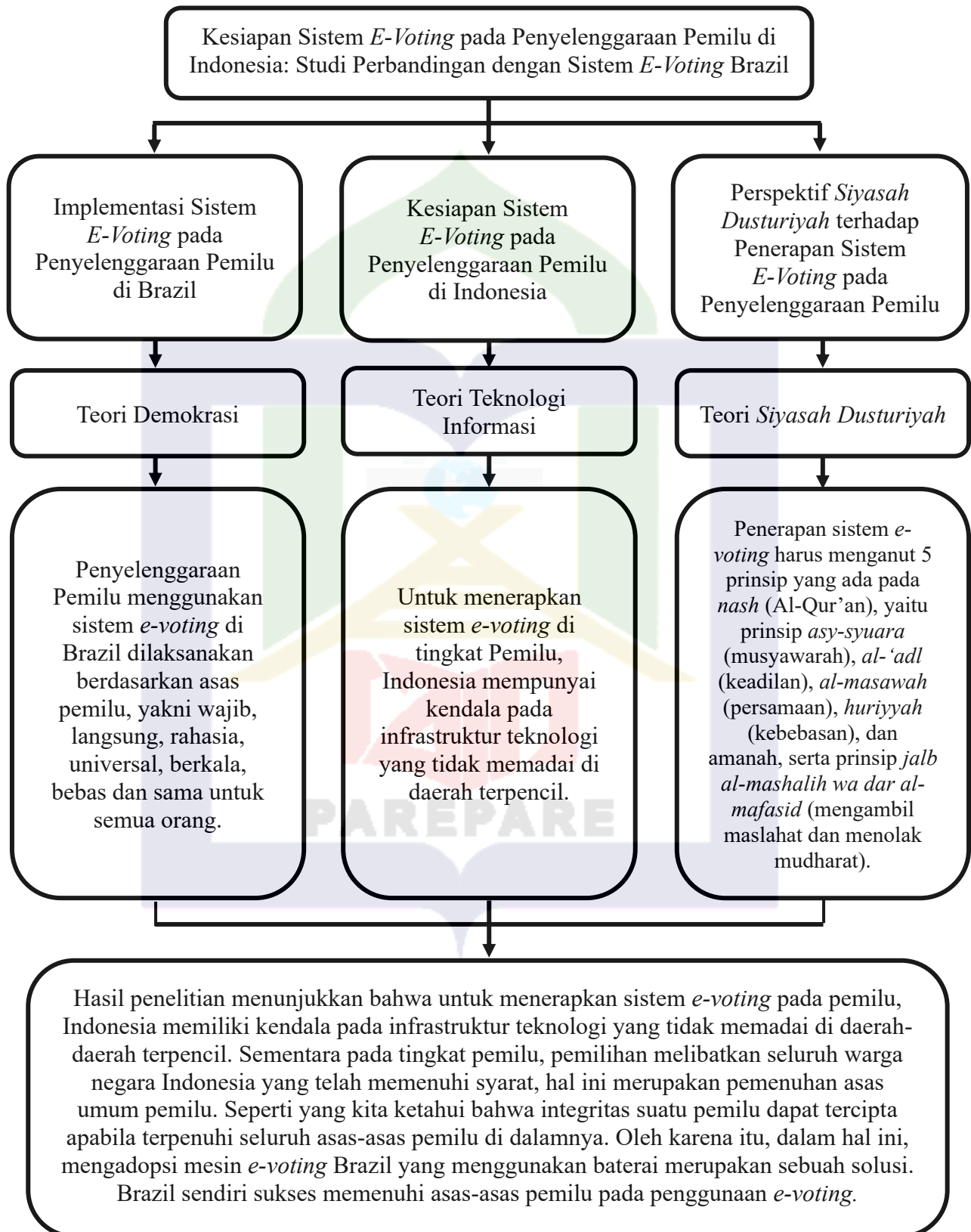
³⁸ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH*, ed. oleh M. Harir Muzakki (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). h. 12-13

masa ke masa. Teladan Nabi masih dapat diterapkan oleh para khulafaurrasyidin dalam mengelola negara Islam yang terus berkembang. Namun, setelah berakhirnya masa kepemimpinan khulafaurrasyidin, terutama pada abad ke-19, negara Islam mengalami penjajahan yang berat. Akibatnya, para ahli tata negara di berbagai wilayah Islam mulai mempertimbangkan pembuatan konstitusi tertulis. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam serta pengaruh gagasan politik Barat yang masuk bersamaan dengan kolonialisme.³⁹



³⁹ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran*, ed. oleh Nur Khasanah (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021). h. 14-15

H. Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori dan kepustakaan lainnya untuk menjawab bagaimana kesiapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, saran yang dihasilkan dari penelitian harus sedapat mungkin diterapkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan sistem *e-voting*. Dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya; antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar; atau antara regulasi dengan Undang-undang.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan implementasi sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Brazil dengan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan *e-voting*, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Data

Penelitian normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian normatif jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat otoritatif, artinya data tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan otoritasnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 5) Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/1115/BPD
- 6) *Constitutional* 1988

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan pandangan para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan sistem *e-voting*.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber sejenis yang diakses melalui internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yakni dengan cara membaca, mengamati, menelaah, mengkaji dan kemudian menyimpulkan data-data yang didapat dari internet maupun literatur yang berkaitan dengan sistem *e-voting*.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam mengolah data, penelitian ini melakukan klasifikasi menurut penggolongan data hukum dan menyusun data hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara data hukum yang satu dengan data hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

BAB II

IMPLEMENTASI SISTEM *E-VOTING* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI BRAZIL

A. Hukum Pemilu di Brazil

Pada abad ke-20, Brazil mengalami krisis politik yang mengganggu stabilitas pemerintahannya. Hak pilih dibatasi dan kekerasan terjadi selama pemilu. Pada praktiknya, orang miskin tidak memiliki suara yang sah dikarenakan para elite dan politisilah yang memilih mereka, kemudian dibawa dan didaftarkan sebagai pemilih untuk dijadikan suara. Dalam arti tertentu, perbedaan antara kewarganegaraan aktif dan pasif cenderung terbalik di Brazil. Kandidat memanipulasi komposisi pemilih dan pada intinya terpilih oleh pemilih yang mereka sendiri daftarkan. Fenomena ini berlangsung sejak proklamasi republik pada tahun 1889 hingga tahun 1985. Namun, restorasi demokrasi telah dimulai perlahan-lahan sejak 1979, dan pada tahun 1989 pemerintahan yang demokratis telah dilakukan secara penuh. Konstitusi Brazil saat ini yang dinamakan Konstitusi 1988, yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1988 merupakan tanda berakhirnya pemerintahan yang otoriter dan menuju ke pemerintahan yang demokratis seperti sekarang ini.⁴⁰

Dalam Konstitusi 1988 menyatakan bahwa Republik Federatif Brazil, yang dibentuk oleh persatuan yang tak terpisahkan dari negara bagian dan kota madya serta distrik federal, adalah negara hukum demokratis dan didirikan berdasarkan kedaulatan, kewarganegaraan, martabat manusia, nilai-nilai sosial dari pekerjaan dan perusahaan bebas, serta pluralisme politik.⁴¹

⁴⁰ Chrisanthi Avgerou, "Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E-Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- Voting in Brazil Voting in Brazil," *Journal of the Association for Information Systems* 14, no. 8 (2013). h. 432

⁴¹ Konstitusi Republik Federatif Brazil, Pasal 14

Pemerintahan Federal Brazil dijalankan oleh tiga lembaga, yaitu lembaga eksekutif oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang dipilih melalui pemilu langsung untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali satu kali; 2) lembaga legislatif oleh Kongres Nasional yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Deputi sebagai perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih melalui pemilu langsung untuk masa jabatan empat tahun, dan Senat Federal sebagai perwakilan negara bagian dengan tiga senator dari setiap negara bagian yang dipilih untuk masa jabatan delapan tahun; dan 3) lembaga yudikatif oleh Mahkamah Agung Federal, Pengadilan Tinggi Federal, Pengadilan Regional, Pengadilan Negara Bagian, dan Pengadilan Pemilihan Umum. Sementara Pemerintahan Negara Bagian dan Munisipalitas dijalankan oleh masing-masing Gubernur bersama Majelis Legislatif dan Walikota bersama Dewan Kota, yang keseluruhan dipilih untuk masa jabatan empat tahun.

1. Sistem Pemilu di Brazil

Pemilu di Brazil diadakan setiap dua tahun, bergantian antara Pemilu Munisipalitas dan Pemilu Federal yang bersamaan dengan Pemilu Negara Bagian. Misalnya, pada tahun 2010, pemilihan dilakukan untuk memilih Presiden dan Gubernur Negara Bagian serta anggota legislatif, baik di tingkat federal maupun negara bagian. Artinya, pada saat yang sama, pemilih diminta untuk menyatakan preferensi mereka untuk jabatan Presiden, Gubernur Negara Bagian, Dewan Deputi, Senat Federal, dan Majelis Legislatif Negara Bagian. Dua tahun kemudian pada tahun 2012, diadakan Pemilu Munisipalitas, yaitu Walikota dan Dewan Kota.

Untuk posisi di cabang eksekutif, jika tidak ada kandidat yang melebihi lebih dari 50% suara sah, akan dilakukan pemungutan suara kedua beberapa minggu kemudian untuk memilih antara dua kandidat yang menerima suara terbanyak. Hal ini berlaku untuk pemilihan Presiden dan Gubernur. Sedangkan untuk pemilihan Walikota, pemungutan suara kedua hanya diadakan di kota-kota yang memiliki lebih dari 200 ribu pemilih. Pemungutan suara pertama

selalu berlangsung pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan pemungutan suara kedua, jika diperlukan, berlangsung pada hari Minggu terakhir di bulan yang sama.

Untuk anggota legislatif di tingkat federal, negara bagian, dan munisipalitas, kandidat dipilih dengan sistem proporsional yang memperhitungkan total suara yang diperoleh setiap partai, yaitu jumlah suara yang diterima oleh setiap kandidat dari partai yang sama dan suara yang diberikan langsung kepada partai itu sendiri (pemilih memiliki opsi untuk memilih kandidat atau hanya partai). Jumlah proporsional dari perwakilan yang harus dimiliki oleh setiap partai dihitung dari total suara yang diterima oleh setiap partai, ini disebut sebagai “*quotient* pemilihan”. Jadi, kandidat yang menerima suara terbanyak di setiap partai, hingga mencapai *quotient* pemilihan partai, akan terpilih.⁴²

2. Asas Pemilu di Brazil

Pelaksanaan pemilu di Brazil harus memenuhi tujuh asas pemilu. Asas ini dianggap sebagai klausul konstitusional yang mengikat dan tidak dapat dilanggar. Ketujuh asas tersebut, ialah:⁴³

- a. Wajib, artinya warga negara yang terdaftar sebagai pemilih diwajibkan untuk melakukan pemberian suara di TPS pada hari pemilihan. Apabila pemilih tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemilih akan dikenakan sanksi berupa larangan untuk terlibat dalam aktivitas sipil, seperti mengikuti tender publik, melakukan kontrak dengan otoritas publik, memperbarui paspor, dan mendaftar dalam ujian kompetitif. Selain itu, pemilih juga akan dikenakan denda.

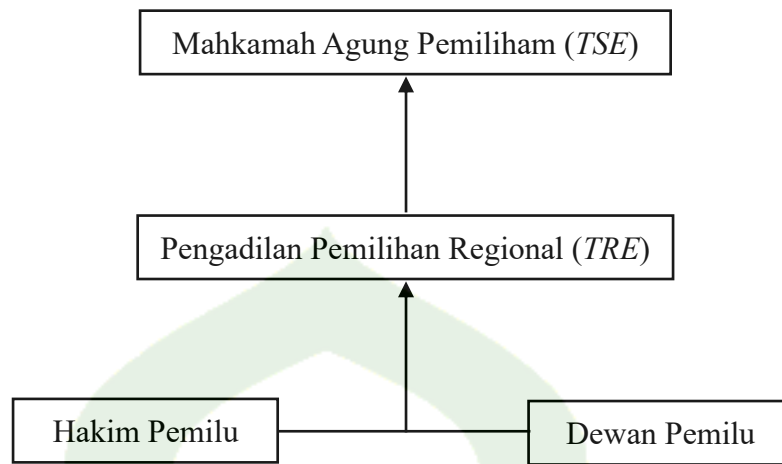
⁴² Ardita Driza Maurer dan Jordi Barrat, E-voting Case Law: A Comparative Analysis (ASHGATE, 2016). h. 66

⁴³ Brazil Tribunal Superior Eleitoral, Practical Guide 2022 Brazilian Elections (International Affair Unit, 2022). h. 32-34

- b. Langsung, artinya pemilih dengan dirinya sendiri tanpa melalui perantara siapapun melakukan pemberian suara untuk kandidat pilihannya.
- c. Universal, artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai pemilih. Dalam Konstitusi 1988 Pasal 14 dinyatakan bahwa pemungutan suara wajib bagi warga negara yang berusia 18 hingga 70 tahun; opsional bagi warga negara yang buta huruf, warga negara yang berusia di atas 70 tahun, dan remaja yang berusia 16 hingga 18 tahun; dan dilarang bagi warga asing dan perwira militer yang menjalani dinas wajib.
- d. Berkala, artinya pemilu selalu diadakan setiap dua tahun.
- e. Bebas, artinya pemberian suara untuk kandidat pilihan pemilih dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- f. Memiliki nilai yang sama untuk semua orang, artinya suara yang diberikan pemilih dalam pelaksanaan pemilu diakui oleh hukum.

3. Penyelenggara Pemilu di Brazil

Brazil memiliki badan penyelenggara pemilu untuk memastikan ketujuh prinsip di atas terpenuhi selama proses pemilihan. Dalam Pasal 118 Konstitusi 1988 disebutkan bahwa badan penyelenggara pemilu di Brazil berbentuk pengadilan yang merupakan bagian dari cabang kehakiman pemerintahan federal. Pengadilan Pemilu di Brazil terdiri dari Mahkamah Agung Pemilihan atau disebut *Tribunal Superior Eleitoral (TSE)*, Pengadilan Pemilihan Regional atau disebut *Tribunal Regional Eleitoral (TRE)*, Hakim Pemilu, dan Dewan Pemilu, dengan tingkatan sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2.1 Penyelenggara Pemilu di Brazil

Pertama, Mahkamah Agung Pemilihan atau disebut *Tribunal Superior Eleitoral (TSE)* merupakan pengadilan pemilu tertinggi di Brazil yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dan pelaksanaan proses pemilu, serta memiliki wewenang untuk menerapkan aturan dalam sistem pemilu di Brazil. Selain itu, *TSE* juga merupakan pengadilan terakhir untuk menangani sengketa pemilu yang terjadi di Brazil. *TSE* terdiri dari tujuh anggota; tiga hakim dari Mahkamah Agung Federal (*Supremo Tribunal Federal*), tiga hakim dari Pengadilan Tinggi (*Superior Tribunal de Justica*), serta dua warga negara dengan pengetahuan hukum yang luar biasa dan reputasi moral yang baik yang dinominasikan oleh *STF* dan dipilih oleh Presiden. Anggota eksternal ini biasanya adalah pengacara yang bekerja di bidang pemilu.

Kedua, Pengadilan Pemilihan Regional atau disebut *Tribunal Regional Eleitoral (TRE)* merupakan pengadilan pemilu tertinggi kedua di Brazil. *TRE* berbasis di setiap ibu kota negara bagian. yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pemilu. Selain itu, *TRE* juga merupakan pengadilan yang menangani sengketa pemilu di Brazil sebelum ke tingkat akhir oleh *TSE*. Setiap *TRE* terdiri dari tujuh anggota; dua hakim banding dari

pengadilan tinggi tingkat negara bagian (*Tribunal de Justica*), dua hakim dari pengadilan tingkat pertama di setiap negara bagian (*Tribunal de Primeira Instancia*) yang dipilih oleh pengadilan tinggi, satu hakim dari pengadilan tingkat pertama federal (*Justica Federal de Primeira Instancia*), serta dua warga negara dengan pengetahuan hukum yang luar biasa dan reputasi moral yang baik yang dinominasikan oleh *STF* dan dipilih oleh Presiden.

Ketiga, Hakim Pemilu merupakan pengadilan pertama yang menangani sengketa pemilu di Brazil sebelum ke tingkat *TRE*. Hakim Pemilu juga ikut serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemilu. Hakim Pemilu dipilih diantara hakim negara bagian oleh *TRE*.

Keempat, Dewan Pemilu merupakan badan ad hoc yang dibentuk hanya untuk pelaksanaan proses pemilu. Dalam hal ini Dewan Pemilu membantu Hakim Pemilu melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan selama proses pemilu berlangsung. Enam puluh hari sebelum pemilu, *TRE* memilih seorang hakim dan dua warga negara dengan pengetahuan hukum yang baik dan yang reputasi moral yang baik.⁴⁴

B. Sistem *E-Voting* di Brazil

E-voting di Brazil dimulai pada tahun 1985 ketika penyelenggara pemilu Brazil melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Agung Brazil dengan menggunakan komputer. Setahun setelahnya, pada 1986, pemerintahan Brazil melakukan *feasibility study* terhadap penggunaan teknologi *e-voting*. Kemudian pada tahun 1996, mekanisme *e-voting* mulai diperkenalkan pada pemilu lokal di Kota Santa Catarina. Dua tahun setelahnya, pada 1998, sistem *e-voting* diperkenalkan secara nasional di tataran pemilu sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2006 sampai sekarang, Brazil terus mengembangkan konsep pemilihan demokrasi melalui *e-voting*.

⁴⁴ Marchetti Vitor, "Electoral Governance in Brazil," *Brazilian Political Science Review* 6, no. 1 (2012): 113–33. h. 116-117

1. Hukum *E-Voting* di Brazil

Pembahasan mengenai *e-voting* di Brazil mulai dilakukan pada tahun 1994 oleh Mahkamah Agung Federal (TSE). TSE berupaya mencari solusi untuk mengatasi praktik manipulasi yang sering terjadi pada tahap rekapitulasi hasil suara. Baik TSE, peserta pemilu, pemilih, maupun pemangku kepentingan lainnya menilai bahwa metode rekapitulasi suara yang digunakan sebelumnya tidak efektif, terlalu kompleks, memakan waktu lama, dan rentan terhadap kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, hanya TSE yang melihat teknologi sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan dukungan kepercayaan publik yang kuat terhadap TSE serta pengalaman positif dalam penggunaan teknologi pada tahap pendaftaran pemilih dan rekapitulasi suara selama periode 1994-1995, TSE memasukkan ketentuan dalam Undang-undang Pemilu untuk menerapkan sistem pemungutan suara secara elektronik.

Dalam waktu singkat, Parlemen Brazil menyetujui usulan Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh TSE, meskipun peraturan tersebut tidak secara rinci menguraikan spesifikasi atau mekanisme kerja mesin *e-voting*. Undang-undang tersebut hanya menetapkan bahwa pemilih harus memilih kandidat dengan memasukkan nomor kandidat yang diinginkan, serta memastikan bahwa foto kandidat akan ditampilkan pada layar monitor. Selain itu, undang-undang mewajibkan TSE untuk memberikan kesempatan kepada partai politik atau perusahaan yang dikontrak oleh partai untuk mengaudit kode yang digunakan dalam mesin *e-voting* setidaknya 120 hari sebelum pemilihan berlangsung.

Setelah Undang-undang Nomor 9.100 Tahun 29 September 1995 disahkan, TSE mulai mengimplementasikan sistem pemilihan elektronik atau *e-voting*. Untuk praktik pertama, pada tahun 1996, sistem *e-voting* hanya diterapkan pada pemilihan di tingkat lokal. Namun, pada tahun 1998, dengan

disahkannya Undang-undang Nomor 9.504 Tahun 30 September 1997, sistem *e-voting* sudah diterapkan pada pemilihan di tingkat nasional.⁴⁵

2. Sejarah *E-Voting* di Brazil

Sebelum *e-voting* diperkenalkan, sistem pemilihan di Brazil sangat terkontaminasi oleh kecurangan-kecurangan. Ada dua alasan utama mengapa TSE mengadopsi *e-voting*, yang pertama adalah untuk mengatasi kecurangan yang sering terjadi selama proses tabulasi surat suara kertas, dimana penghitung suara yang bersekutu dengan kandidat akan mengurangi suara dari satu kandidat dan menambahkannya ke jumlah suara kandidat yang diunggulkan. Kedua adalah untuk mengatasi masalah terkait surat suara kertas yang tidak dapat diakses, baik itu karena surat suara rusak ataupun surat suara tidak sah. Kejadian ini diakibatkan oleh banyaknya pemilih yang mengalami kesulitan dalam memberikan suara dikarenakan kemampuan literasi yang rendah.⁴⁶

Dari tahun 1954 hingga 1996, semua pemilih Brazil memberikan suara dengan surat suara yang disediakan oleh pemerintah. Tidak seperti di sebagian besar negara demokrasi, dimana surat suara mencantumkan semua calon dan partai yang akan dipilih, di Brazil jumlah pilihan yang tersedia membuat opsi ini tidak praktis. Akibatnya, surat suara mengharuskan pemilih untuk menulis nama kandidat atau nomor kandidat yang berjumlah lima digit untuk calon wakil federal dan enam digit untuk calon wakil negara bagian. Pemilih juga bisa hanya menulis nama partai atau nomor partai untuk memberikan suara kepada partai dan tidak menunjukkan pilihan untuk kandidat tertentu. Hal inilah yang mengakibatkan banyak surat suara yang tidak dapat diakses, pemilih dengan kemampuan literasi yang rendah kesulitan dalam memberikan suara yang sah. Instruksi surat suara yang rumit ditambah banyak pemilih dengan

⁴⁵ Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*, ed. oleh Antony Lee (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019). h. 26

⁴⁶ Okuro Ongwen, "Comparative Review of E-voting in India and Brazil: Key Lessons for Kenya," *Lagos Historical Review* 21, no. 1 (2021): 26–56. h. 34-35

keterbatasan membaca dan menulis membuat surat suara menjadi tidak sah karena nama atau nomor kandidat tidak ditulis dengan jelas. Dengan pengenalan sistem *e-voting*, pemilih hanya perlu memasukkan nomor kandidat atau partai yang dipilih. Setelah itu, foto kandidat atau partai akan muncul dilayar untuk konfirmasi.⁴⁷

Sistem *e-voting* memberikan hak suara kepada pemilih dan meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Antara tahun 1996 hingga 2002, jumlah pemilih Brazil yang memberikan suara menggunakan mesin *e-voting* semakin meningkat, menggantikan surat suara kertas. Perubahan dalam prosedur pemungutan suara ini mengubah komposisi pemilih. Dimana sebelum tahun 1998, persentase pemilih yang memberikan suara kosong atau tidak sah dalam pemilihan legislatif di setiap kota umumnya lebih dari 20% dari suara yang diberikan dan melampaui 40% dalam sebagian besar kasus. Pada tahun 1998, ketika sekitar 50% pemilih menggunakan *e-voting*, distribusi suara tidak sah turun secara signifikan, dan pada tahun 2002, ketika *e-voting* diberlakukan secara penuh, hampir semua negara bagian memiliki kurang dari 10% suara tidak sah atau kosong.⁴⁸

3. Teknologi *E-Voting* di Brazil

Mesin *e-voting* yang digunakan di Brazil adalah *GX-1 Integrated Processor*, yaitu sebuah mikro komputer yang didesain khusus untuk kepentingan pemilu. Secara fisik mesin ini kuat, berukuran kecil, ringan, tidak bergantung pada suplai listrik karena menggunakan baterai internal dilengkapi dengan baterai eksternal jika baterai internal habis, Mesin ini juga didesain untuk mempermudah pemilih disabilitas. Visualisasi kandidat ditampilkan pada monitor mesin, huruf braille dipasang pada papan tombol mesin, audiodeskripsi,

⁴⁷ Rodrigo Schneider, "Free or Fair Elections? The Introduction of Electronic Voting in Brazil," *ECONOMIA* 1, no. 21 (2020): 73–100. h. 78

⁴⁸ Fernando Daniel Hidalgo, *Renovating Democracy: The Political Consequences of Election Reforms in Post-War Brazil* (UC Berkeley, 2012). h. 13-14

dan Libras (bahasa isyarat Brazil). Mesin *e-voting* Brazil memiliki 2 bagian, yaitu panel kontrol yang dioperasikan oleh petugas TPS dan panel pemungutan suara untuk pemilih.



Gambar 2.2 Panel Kontrol Untuk Petugas TPS



Gambar 2.3 Panel Pemungutan Suara Untuk Pemilih

Panel kontrol untuk petugas TPS memiliki; 1) *keypad* yang terdiri dari angka-angka untuk petugas mencatat nomor pendaftaran pemilih, 2) layar yang menampilkan nama pemilih ketika nomor pemilih telah dimasukkan, dan 3) fitur identifikasi pemilih dengan teknologi biometrik. Dan panel pemungutan suara untuk pemilih memiliki; 1) tombol angka untuk pemilih memasukkan nomor kandidat pilihannya, 2) layar untuk menampilkan nama, nomor, dan foto kandidat ketika pemilih telah memasukkan nomor kandidat pilihannya, 3) tombol untuk tidak memilih kandidat siapa pun atau suara kosong, 4) tombol untuk menghapus apabila pemilih salah memasukkan nomor kandidat pilihannya, dan 5) tombol untuk mengirim atau mengonfirmasi pilihan yang telah dimasukkan oleh pemilih.⁴⁹

Mesin *e-voting* Brazil dalam melakukan setiap tahapan proses pemilihan di dukung oleh beberapa sistem digital yang berfungsi untuk mencegah ketidaksesuaian sehingga menjamin keamanan proses pemilihan. Beberapa sistem tersebut, ialah:

⁴⁹ “Penerapan E-voting Dan E-Counting Pada Pemilu Di 7 Negara, Bagaimana Hasilnya?,” Hompimpa!, Februari 2017, <http://www.hompimpa.id/2017/02/e-voting-dan-e-counting.html>.

- a. Data, Aplikasi, dan *Interface* pada Pengelola Mesin *E-voting* (*Gedai-UE*), yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memuat daftar informasi pemilih maupun calon kandidat, menerima dan mengirim suara pemilih, serta aktivasi aplikasi mesin *e-voting*.
- b. Sistem Pengelolaan Penghitungan (*Sistot*), yaitu sekumpulan program yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola hasil pemungutan suara.
- c. *JE-Connect*, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk mengirim hasil penghitungan suara pada mesin *e-voting* langsung dari tempat pemungutan suara.
- d. *Uenux*, yaitu sistem yang beroperasi untuk melindungi keamanan mesin *e-voting*.

Pada pelaksanaan pemilu di Brazil, pemilih juga difasilitasi sistem digital untuk mengakses informasi dan layanan terkait proses pemilu. Sistem tersebut, ialah:

- a. *Título Net*, yaitu sistem berupa web yang digunakan pemilih untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data diri pemilih.
- b. *E-Título*, yaitu sistem berupa aplikasi yang digunakan pemilih untuk mengakses kartu pemilih mereka, yang memuat informasi seperti nama, nomor registrasi pemilih, serta waktu dan lokasi tempat pemungutan suara. aplikasi ini juga memuat informasi mengenai hak pilih pemilih pada pemilihan tertentu.
- c. Sistem Permintaan Pembetulan, yaitu sistem berupa web yang digunakan pemilih untuk mengirimkan permintaan izin berupa bukti dokumen atas ketidakhadirannya ke tempat pemungutan suara. Setelah dikirim, permintaan tersebut dianalisis, dan jika dibenarkan, maka permintaan diterima sebagai pembetulan untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara.
- d. *Pardal*, yaitu sistem berupa web yang digunakan pemilih untuk melaporkan jenis pelanggaran pemilu yang didapati, seperti aktivitas kampanye yang

tidak teratur, penyalahgunaan kekuasaan oleh politis, politik uang, dan sebagainya.

- e. *Resultados-TSE*, yaitu sistem berupa platform yang disediakan oleh TSE untuk menayangkan hasil pemilihan secara *real-time* kepada publik. Platform ini dapat diakses oleh seluruh warga negara Brazil untuk memantau hasil pemilihan secara cepat dan transparan.⁵⁰

4. Praktik *E-Voting* pada Pemilu di Brazil

Pemilu di Brazil selalu berlangsung pada bulan Oktober. Pada bulan Desember tahun sebelum pemilihan, TSE mengajukan rancangan resolusi ke parlemen untuk memperbarui undang-undang pemilu. Resolusi ini juga mengidentifikasi perubahan perangkat lunak yang akan digunakan, agar nantinya undang-undang dapat diberlakukan ke dalam versi baru sistem *e-voting*. Dalam waktu satu bulan, TSE merevisi sistem sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam resolusi yang telah disetujui. Pengembangan perangkat lunak diselesaikan 180 hari sebelum pemilihan. Kemudian perubahan kode sumber juga disediakan untuk ahli IT partai politik dengan tujuan untuk memeriksa apakah sistem tersebut mematuhi undang-undang atau tidak.

Enam puluh hari sebelum pemilihan, perangkat lunak disegel dalam sebuah upacara publik, dimana partai politik dan perwakilan masyarakat sipil diundang untuk berpartisipasi. Selama upacara, rangkaian tugas berlangsung. Pertama adalah pembuatan tabel fungsi *hash*, yang digunakan untuk mencegah kode sumber perangkat lunak dimodifikasi. Kedua adalah penandatanganan digital terhadap versi terkompilasi dari kode perangkat lunak. Ketiga adalah pemeriksaan integritas perangkat lunak yang telah diunggah ke mesin *e-voting*, oleh perwakilan partai politik yang berwenang, dengan menggunakan tanda

⁵⁰ Tribunal Superior Eleitoral, Practical Guide 2022 Brazilian Elections. h. 52-54

tangan digital mereka. Selanjutnya adalah enkripsi perangkat lunak, yang kemudian didistribusikan ke TRE.

Beberapa hari sebelum pemilihan, setiap TRE memuat mesin *e-voting* dengan informasi kandidat (nama, nomor, singkatan partai atau koalisi, dan foto), data pemilih, dan aplikasi perangkat lunak. Perwakilan partai politik diwajibkan menghadiri proses pemuatan ini. Tes validasi dilakukan pada sampel tiga persen dari jumlah keseluruhan mesin *e-voting* yang dipilih secara acak oleh perwakilan. Sehari sebelum pemilihan, mesin *e-voting* ditempatkan di lokasi pemilihan. Sebagian dari mesin ini dibawa kembali ke TRE untuk tes keandalan dengan simulasi sesi pemungutan suara. Jika tidak ada kerusakan yang terdeteksi, setiap mesin harus dikembalikan ke lokasi sebelum pukul 7.30 pagi pada hari pemilihan.⁵¹

Pada hari pemungutan suara pukul 7.30 pagi, di hadapan perwakilan partai dan saksi, Ketua TPS menyalakan mesin *e-voting* dan mencetak laporan *zeroth*, sebagai bukti bahwa semua kandidat terdaftar di dalam mesin dan bahwa belum ada suara yang terisi. Pemilih yang sudah berada di TPS menunjukkan nomor pendaftaran ke petugas TPS, dan pemilih diarahkan untuk melakukan identifikasi diri menggunakan sidik jari atau kartu identitas pada mesin biometrik. Setelah terkonfirmasi nama dan nomor pemilih, pemilih menuju ke bilik suara untuk memasukkan nomor kandidat pilihannya pada mesin *e-voting*. Ketika pemilih memasukkan nomor kandidat pilihannya, layar mesin *e-voting* akan menampilkan nama, nomor, dan foto kandidat, apabila sudah sesuai, maka pemilih bisa mengirim pilihannya dengan menekan tombol konfirmasi yang ada di mesin *e-voting*.

Pada pukul 5 sore, TPS secara resmi ditutup. Sesaat setelah penutupan, mesin *e-voting* mencetak data dalam bentuk *barcode*, yang dapat diakses oleh

⁵¹ Chrisanthi Avgerou, "Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E-Voting in Brazil," *Journal of the Association for Information Systems* 14, no. 8 (2013). h. 433-434

siapa saja. *Barcode* yang dicetak tersebut kemudian ditandatangani oleh petugas TPS untuk memastikan kesesuaian antara data yang dikirim ke pusat tabulasi melalui sistem jaringan dengan data yang tercetak di TPS. Selain itu, perangkat penyimpanan eksternal (sejenis *hard disk*) dikeluarkan dari mesin *e-voting* dan langsung dikirim ke pusat data TSE. Dengan demikian, data hasil pemungutan suara tersimpan dalam tiga bentuk, yaitu di dalam mesin, *barcode* cetak, dan perangkat penyimpanan eksternal. Hanya dalam 15 menit setelah TPS ditutup, petugas dapat membereskan perlengkapan dan melipat bilik suara sebelum meninggalkan lokasi. Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara dapat langsung dipantau secara daring dan *real-time* melalui *YouTube Media Center TSE*.⁵²

C. Tantangan Pelaksanaan Pemilu Menggunakan Sistem *E-Voting* di Brazil

Pada awalnya, penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilihan di Brazil tidak terlalu ditentang oleh masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Brazil hanya khawatir terhadap sistem tersebut. Mereka beranggapan bahwa negara dengan teknologi maju saja tidak menerapkan sistem *e-voting*. Kemudian, dengan tindakan TSE yang sangat cepat mengambil keputusan untuk segera menerapkan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilihan mengakibatkan tidak adanya kesempatan untuk melakukan debat publik. TSE bersama pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem *e-voting* sebagai simbol bahwa Brazil telah mengalami kemajuan teknologi, dan hal ini menjadi sesuatu yang harus dibanggakan masyarakat Brazil. Oleh sebab itulah, kekhawatiran masyarakat dianggap sebagai tindakan tidak patriotik. Namun, TSE masih mengupayakan untuk bisa memperoleh kepercayaan publik terhadap sistem *e-voting*. TSE melakukan strategi berupa sosialisasi melalui TV dan surat kabar. Pada praktiknya, setiap dua tahun

⁵² Vitorio Mantalean dan Diamanty Meiliana, "Cerita Bawaslu Pantau E-voting Brazil: Rekapitulasi Beres 5 Jam, KPPS Hanya Dibayar Makan Siang," KOMPAS.com, 10 Oktober 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/18172041/cerita-bawaslu-pantau-e-voting-brazil-rekapitulasi-beres-5-jam-kpps-hanya>.

sekali dan beberapa bulan sebelum pemilihan, TV dan surat kabar memasang iklan berisi cara memilih menggunakan *e-voting* berserta manfaatnya.

Perdebatan mengenai penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan di Brazil tidak hanya terjadi pada awal penerapannya, akan tetapi penggunaan mesin *e-voting* tanpa alat audit, sampai saat ini menjadi kekhawatiran yang berujung pada perdebatan. Pasalnya, alat audit berfungsi untuk mencetak jejak data dokumen suara pemilih yang diverifikasi dalam bentuk kertas. Kertas ini akan menjadi bukti bahwa suara pemilih telah direkam. Oleh karena itu, apabila alat audit tidak digunakan pada mesin *e-voting* maka akan menimbulkan kecurigaan bagi pemilih yang mempertanyakan pilihan mereka terekam atau tidak.

Kalangan akademisi dan politisi menginginkan untuk digunakannya alat audit pada mesin *e-voting*. Perintah untuk menggunakan alat audit pada mesin *e-voting* sebenarnya sudah diatur dalam UU Pemilu No.10.408. Namun, TSE menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa penggunaan alat audit pada mesin *e-voting* akan memunculkan kembali masalah kecurangan yang terjadi pada metode pemilihan yang menggunakan kertas suara. Selain itu, penggunaan alat audit pada mesin *e-voting* juga akan memakan biaya. Setelah penolakan yang dilakukan oleh TSE, Kongres memperbarui regulasi, kemudian menerbitkan UU Pemilu No.1.503, yang menghapuskan penggunaan alat audit pada mesin *e-voting*. Sebagai pengganti alat audit, pengamat eksternal dipersilakan untuk memeriksa perangkat lunak mesin *e-voting*, dan mesin *e-voting* diharuskan untuk menghasilkan file rekaman Digital Ballots Register. Rekaman ini berfungsi untuk memastikan total suara pemilih sama dengan pemilih yang memberikan suara.⁵³

⁵³ Pratama dan Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu. h. 27

BAB III

KESIAPAN SISTEM *E-VOTING* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

A. Hukum Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan mekanisme bagi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu ini diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

1. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung dan diadakan setiap lima tahun dua kali. Pemilu pertama untuk pemilihan presiden dan wakil Presiden yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Kemudian pemilu kedua dilakukan beberapa bulan setelahnya untuk pemilihan kepala daerah.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50% dari total suara sah secara nasional serta minimal 20% suara sah di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kriteria tersebut, maka pemilu dilanjutkan ke putaran kedua, yang hanya diikuti oleh dua pasangan dengan perolehan suara tertinggi pada putaran pertama. Pasangan yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua ditetapkan sebagai pemenang.

Untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilih memberikan suara untuk partai politik dan calon anggota legislatif di tingkat daerah pemilihan (dapil). Kursi dialokasikan kepada partai politik berdasarkan

perolehan suara partai, dan calon terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak di dalam partainya di dapil tersebut.

Untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem representasi individual. Pemilih memberikan suara untuk calon anggota DPD secara individual. Setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Untuk pemilihan kepala daerah, pasangan yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak ada pasangan yang mendapatkan mayoritas mutlak, putaran kedua dilakukan antara dua pasangan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak pada putaran kedua akan menjadi pemenang.

2. Asas Pemilu di Indonesia

Undang-undang pemilu secara konsisten menetapkan enam prinsip dasar dalam pelaksanaannya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu.⁵⁴

- a. Langsung berarti setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya sendiri tanpa perantara, sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Umum menunjukkan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi.
- c. Bebas menegaskan bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya secara mandiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia berarti pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak dapat diketahui oleh siapapun melalui cara apapun.

⁵⁴ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., Hukum Pemilu di Indonesia (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
h. 8-10

- e. Jujur mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih, untuk bersikap serta bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Adil memastikan bahwa setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu memperoleh perlakuan yang setara serta terbebas dari segala bentuk kecurangan.

3. Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama yang memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ketiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Berikut struktur organisasi KPU:
 - KPU Pusat: Mengelola penyelenggaraan pemilu secara nasional.
 - KPU Provinsi: Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi.
 - KPU Kabupaten/Kota: Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
 - PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan): Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.
 - PPS (Panitia Pemungutan Suara): Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan.
 - KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara): Mengelola pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip pemilu yang adil dan demokratis. Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Berikut struktur organisasi Bawaslu:

- Bawaslu Pusat: Mengawasi penyelenggaraan pemilu secara nasional.
- Bawaslu Provinsi: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi.
- Bawaslu Kabupaten/Kota: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- Panwaslu Kecamatan: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.
- Panwaslu Desa/Kelurahan: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan.
- Pengawas TPS: Mengawasi pemungutan suara di TPS.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU dan Bawaslu. DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

B. Sistem *E-Voting* di Indonesia

Implementasi *e-voting* pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 2009 di Kabupaten Jembrana, Bali dalam lingkup pemilihan kepala desa (Pilkades). Inisiatif ini adalah langkah awal untuk menguji coba teknologi pemungutan suara elektronik dalam konteks pemilihan lokal di Indonesia. Setelah uji coba di Jembrana, beberapa daerah lain di Indonesia juga mulai mengadopsi *e-voting* untuk pemilihan kepala desa dan pemilihan organisasi lainnya.

1. Hukum *E-Voting* di Indonesia

Inisiatif uji coba *e-voting* pada pemilihan kepala desa di Jembrana membuahkan payung hukum untuk *e-voting* diterapkan sebagai sistem pemungutan suara di Indonesia, dimana sebelumnya salah satu penghalang untuk dapat digunakannya sistem *e-voting* pada pemilihan ialah karena tidak adanya regulasi yang mengatur. Payung hukum tersebut ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan yang dihasilkan mencakup aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berbasis teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 memuat pertimbangan MK terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kasus uji materiil Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*", Para Pemohon dalam salah satu permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 88. Permohonan ini diajukan karena mereka berencana menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah di Jembrana pada tahun 2010. Namun, Pasal 88 hanya mengatur mekanisme pemungutan suara dengan cara "mencoblos" tanpa mencantumkan metode *e-voting*. Akibatnya, pasal tersebut dianggap berpotensi menghambat penerapan *e-voting* dan bahkan dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dengan metode tersebut.

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*",

yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa *“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*, maka para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghambat penggunaan metode pemungutan suara berbasis teknologi informasi, yang seharusnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui sistem *e-voting*. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan agar *e-voting* dapat dilegalkan sebagai bentuk transformasi dari sistem pemilihan umum konvensional.

Untuk memberikan keadilan kepada para pemohon, Mahkamah Konstitusi memperhatikan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”* dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*. Melalui kedua pasal ini, tidak ada halangan untuk keberlakuan *e-voting* sebagai transformasi pemilihan umum dari pemilihan umum konvensional.

Namun, karena banyak wilayah di Indonesia yang belum mampu menerapkan sistem *e-voting* akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan infrastruktur, seperti listrik dan jaringan internet, pencabutan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencabut Pasal 88. Jika pasal tersebut dihapus, maka akan terjadi kekosongan hukum. Dengan tetap

berlakunya Pasal 88, daerah yang belum siap melaksanakan *e-voting* masih dapat menyelenggarakan pemilu secara konvensional melalui metode mencoblos atau mencontreng.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kata “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.⁵⁵

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dilakukannya perubahan atas peraturan tentang Pilkada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Ketetapan mengenai sistem Pilkada dicantumkan dalam Pasal 85 yang berbunyi:

- (1) *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
 - a) *memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
 - b) *memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.⁵⁶*

Selanjutnya pada perubahan kedua undang-undang Pilkada, tepatnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terdapat perubahan pasal sehingga di antara Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 ayat, yakni Ayat (2a) dan Ayat (2b) dengan demikian, Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
 - a) *memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
 - b) *memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*
- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2a) *Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi Infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.*
 - (2b) *Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan*

⁵⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 85

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).⁵⁷

2. Teknologi *E-Voting* di Indonesia

Pada praktiknya, penggunaan teknologi dalam pemilu di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk; penggunaan teknologi dalam tahapan pemilu, penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara, dan penggunaan teknologi pada pemungutan suara.

Teknologi dalam Tahapan Pemilu, terdiri atas:

- a. Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah sebuah sistem yang mengelola dan memutakhirkan data pemilih. Sistem ini digunakan oleh PPS, PPK, dan KPU untuk memasukkan dan memperbarui data pemilih. Sistem ini secara otomatis mampu memverifikasi keakuratan data pemilih, serta mencegah duplikasi data pemilih. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk mengalokasikan pemilih ke TPS. Sistem ini dapat diakses oleh pemilih untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum.
- b. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sebuah sistem yang mengelola dan memverifikasi data partai politik. Sistem ini digunakan oleh partai politik untuk melakukan proses pendaftaran. Pada sistem ini, partai politik mengunggah dokumen-dokumen digital yang menjadi persyaratan administratif pencalonan. Sistem ini secara otomatis mampu mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif partai politik. Sistem ini juga memungkinkan untuk partai politik jika ingin melakukan perubahan informasi.
- c. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) adalah sebuah sistem yang mengelola dan memproses data pencalonan. Sistem ini digunakan oleh calon yang maju untuk melakukan proses pendaftaran. Pada sistem ini, calon yang

⁵⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 85

maju mengunggah dokumen-dokumen digital yang menjadi persyaratan administratif pencalonan. Sistem ini secara otomatis mampu mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif sang calon. Sistem ini juga memungkinkan untuk calon jika ingin melakukan perubahan informasi.

- d. Silog (Sistem Informasi Logistik) adalah sebuah sistem yang mengelola dan memantau logistik pemilihan. Sistem ini digunakan oleh KPU untuk merencanakan, mengatur, dan memantau distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan pemilu lainnya, ke seluruh daerah di Indonesia. Sistem ini dapat melakukan pelacakan *real-time* dari status dan lokasi barang-barang logistik serta memastikan bahwa semua perlengkapan pemilu tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik.
- e. Sidakam (Sistem Informasi Data Keanggotaan Partai Politik) adalah sebuah sistem yang mengelola data keanggotaan partai politik. Selain itu, sistem ini juga mencakup Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi rincian sumber sumbangan, baik dari individu, badan usaha, partai politik, maupun calon, beserta jumlah minimal yang diterima. Selain itu, portal ini menyediakan informasi terkait rincian jumlah serta bentuk pengeluaran kampanye, termasuk hasil audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Teknologi dalam Rekapitulasi Suara

Teknologi yang digunakan KPU dalam proses rekapitulasi suara adalah sebuah sistem yang dinamakan Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara). Sistem ini terdiri atas tiga aplikasi, yaitu:

- a. *Scan C1*, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk memindai C1, yakni dokumen hasil perhitungan suara di tingkat TPS.
- b. *E-Recap*, yaitu sebuah aplikasi *offline* yang digunakan untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara.
- c. Excel, yaitu sebuah aplikasi yang menggunakan Microsoft Excel untuk menampilkan *softcopy* dokumen reka tingkat kecamatan (formulir DA1),

dokumen rekap tingkat KPU kabupaten/kota (formulir DB1), dan dokumen rekap KPU provinsi (formulir DC1). Aplikasi ini akan digunakan pada rapat pleno rekapitulasi hasil oleh KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, dan akan ditampilkan pada portal informasi publik.

Teknologi pada Pemungutan Suara, terdiri atas:



Gambar 3.1 Laptop dan Pembaca *E-KTP*



Gambar 3.2 Monitor Layar Sentuh, Pembaca *Smartcard*, Alat Audit, dan Aksesibilitas Disabilitas

- a. Laptop, teknologi ini digunakan untuk membuka aplikasi DPT. Apabila *e-KTP* pemilih terverifikasi, maka absensi pemilih pada aplikasi DPT akan terisi secara otomatis.
- b. Pembaca *e-KTP*, teknologi ini digunakan untuk memverifikasi identitas pemilih dengan memindai data pada *e-KTP* pemilih.
- c. Monitor layar sentuh, teknologi ini digunakan sebagai media untuk memberikan suara. Teknologi ini akan menampilkan nama, nomor, dan foto kandidat, terdapat juga pilihan untuk suara kosong. Setelah menentukan pilihan, maka teknologi ini akan menampilkan tombol “ya” untuk mengonfirmasi dan tombol “tidak” untuk membatalkan.
- d. Pembaca *smartcard*, teknologi ini berfungsi untuk membaca *v-token* yang digunakan untuk mengaktifkan mesin *e-voting*. Apabila *v-token* terkonfirmasi, mesin *e-voting* akan aktif dan langsung menampilkan para kandidat.

- e. Alat audit, teknologi ini digunakan untuk mencetak kertas yang digunakan sebagai bukti bahwa pilihan pemilih terekam.
- f. Alat aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.⁵⁸

3. Praktik *E-Voting* pada Pilkadaes di Kabupaten Jembrana Bali

Profesor Gede Winasa, yang menjabat sebagai Bupati Jembrana dari tahun 2000 hingga tahun 2010, mengusulkan untuk menerapkan *e-voting* karena tidak puas dengan sistem pemilu sebelumnya, yang menyebabkan banyak masalah dan kerusuhan. Bupati melihat peluang untuk mengembangkan *e-voting* dari sistem Jembrana *Smart School* (JSS), sebuah sistem akademik terintegrasi yang telah diterapkan di beberapa sekolah di Jembrana. Sistem JSS memiliki fitur pemesanan makanan yang digunakan di kantin sekolah. Dengan menggunakan kartu pelajar, siswa dapat menggunakan fitur ini. Melihat ini, pada tahun 2009, Bupati memberi tugas kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi untuk memodifikasi sistem JSS dengan mengganti menu makanan menjadi opsi calon kepala desa. Untuk proses identifikasi dan verifikasi pemilih, mereka menggunakan *e-KTP* yang mereka namakan J.ID (*Jembrana Identity*). Sementara itu, bagian hukum Jembrana mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, yang mengatur tentang *e-voting*. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan *e-voting* adalah untuk mencapai kualitas pemilu yang independensi, kerahasiaan, kejujuran, keadilan, dan demokrasi sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.⁵⁹

Jika pemilihan dengan cara konvensional diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Daerah, pada pemilihan dengan cara *e-voting* ini diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan

⁵⁸ Pratama dan Salabi, *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*.

⁵⁹ Aprilia Hartami dan Putu Wuri Handayani, ECEG2012-Proceedings of the 12th European Conference on e-Government: ECEG, ed. oleh Mila Gasco, vol. 1 (Barcelona: Academic Publishing International Limited, 2012). h. 337-338

yang dibantu oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu:

- a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);
- b. Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Dusun;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; serta
- e. Bagian Umum, Sekretariat Daerah.

Proses *e-voting* di Jembrana diawali dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan dengan menggunakan data sumber yang berasal dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yaitu DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), minimal 15 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Data D4 yang diterima oleh Panitia Pemilihan selanjutnya dimutakhirkan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat agar menghasilkan DPT yang optimal dan mengakomodasi seluruh warga yang berhak memilih. Hasil validasi data tersebut kemudian disampaikan kembali ke bidang Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. DPT harus sudah tersusun selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemilihan, dan bagi DPT yang belum memiliki *e-KTP* diprioritaskan pembuatannya di Kecamatan setempat paling lambat 1 hari sebelum pemilihan. Namun, apabila pada hari pemungutan suara masih ada DPT belum memiliki *e-KTP* atau KTP dalam keadaan rusak, dapat dilakukan perbaikan atau pencetakan ulang KTP di mobil keliling pembuatan *e-KTP* yang telah disediakan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di TPS.⁶⁰

Setelah merampungkan DPT, proses selanjutnya adalah penyiapan TPS. TPS terdiri dari tempat verifikasi DPT, tempat pemberian *v-token* yang

⁶⁰ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, dan Aevinda Kartini, Memahami E-voting Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). h. 79-81

berbentuk *smartcard*, bilik suara tempat pemilihan, tempat kotak suara untuk *struk* bukti telah memilih, tempat saksi, dan tempat tunggu DPT. Peralatan *e-voting* di TPS terdiri dari mesin verifikasi *e-KTP* dengan teknologi biometrik, laptop untuk petugas pemilihan memverifikasi DPT, mesin pembaca *smartcard*, CPU, mesin *e-voting* berupa PC dengan kemampuan *touch screen*, mesin audit, mesin pemilihan untuk penyandang disabilitas, LCD proyektor dan layar proyektor untuk menampilkan hasil pemilihan, dan perlengkapan nirkabel lainnya. TPS tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan suara, tetapi juga merupakan tempat melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkadaes dengan cara *e-voting*. Jadi, sebelum hari pemilihan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memperkenalkan sistem *e-voting* kepada masyarakat, sekaligus melakukan simulasi pemilihan dengan *e-voting*.

Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS membawa *e-KTP*. Pemilih kemudian diarahkan untuk melakukan verifikasi data diri menggunakan *e-KTP* dan sidik jari pada mesin verifikasi, jika pemilih terdaftar sebagai DPT maka akan tampil nama dan foto pemilih pada aplikasi DPT di laptop yang dioperasikan oleh petugas pemilihan. Mesin verifikasi ini bekerja secara otomatis untuk mendata absensi pemilih, juga dapat mendeteksi pemilih yang sebelumnya telah melakukan voting. Hal ini tentunya mencegah adanya suara tidak sah dikarenakan pemilihan ganda. Setelah data diri terkonfirmasi sebagai DPT, pemilih diberi *v-token* untuk mengaktifkan mesin *e-voting* di bilik suara nanti. Selanjutnya, pemilih menuju ke bilik suara. Untuk dapat melakukan pemilihan, pemilih melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan memasukkan *v-token* ke dalam mesin pembaca *smartcard*. Setelah aktivasi selesai, mesin *e-voting* akan langsung menampilkan surat suara yang berisi nomor, nama, dan foto kandidat, juga terdapat pilihan suara kosong. Pemilih hanya perlu menyentuh gambar kandidat pilihannya atau memberikan suara kosong, kemudian mengonfirmasi dengan memilih tombol “ya”, jika pemilih ingin mengubah pilihan, pemilih bisa memilih tombol “tidak” dan mesin akan

otomatis menampilkan kembali surat suara. Dalam hal ini pemilih hanya bisa memilih satu kandidat dan jumlah pemilih yang telah melakukan pemilihan akan tampil di layar proyektor yang terpasang di TPS. Setelah pilihan terkonfirmasi, mesin audit akan mengeluarkan *struk* bukti telah memilih yang berisikan *barcode*, *struk* tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. *Struk* ini berfungsi sebagai data pembandingan jika terjadi selisih terhadap jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang memberikan suara.

Setelah pemungutan suara selesai dilakukan dan TPS ditutup, hasil perolehan suara dapat langsung ditampilkan dan disaksikan pada layar proyektor. Hasil pemilihan yang ditampilkan meliputi jumlah suara masing-masing kandidat, suara abstain, suara golput, jumlah suara yang melakukan pemilihan, dan jumlah pemilih tetap (DPT). Hasil perolehan suara ini akan langsung terkirim ke website Komisi Pemilihan Umum.⁶¹

C. Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem *E-Voting* pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Selama bertahun-tahun para *stakeholder* terus menawarkan untuk diterapkannya sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia, namun sampai hari ini penawaran tersebut belum dapat direalisasikan dengan alasan Indonesia belum siap. Sementara penerapan *e-voting* sendiri telah berhasil disukseskan oleh banyak daerah di Indonesia dalam lingkup pemilihan kepala desa (Pilkades). Meskipun penerapannya masih pada tingkat lokal, kesuksesan ini memberikan gambaran awal untuk *e-voting* diterapkan pada pemilihan di tingkat nasional.

Merujuk pada praktik *e-voting* Pilkades di Jembrana dan di Brazil yang sukses mengimplementasikan *e-voting* pada tingkat pemilihan nasional, berikut diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menerapkan *e-*

⁶¹ Ananda Syaifullah, "Tahapan Pemilihan Elektronik," *Indonesiabaik.id*, 2019, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik.

voting pada tingkat pemilu berdasarkan kerangka kesiapan *e-voting* yang disusun oleh Risnanto ketika melakukan penelitian terhadap penerapan sistem *e-voting* dari berbagai negara.⁶²

1. Hukum dan Kebijakan

Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur tentang sistem *e-voting*, termasuk Peraturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya, hal ini menjadi hambatan bagi Indonesia sendiri untuk menerapkan *e-voting* pada tingkat pemilu. Meskipun demikian, wacana untuk menerapkan *e-voting* pada pemilu tidak berhenti dibahas sampai hari ini. Mengingat bahwa Indonesia sendiri memiliki peluang akan hal tersebut. Kesuksesan *e-voting* pada pilkades di berbagai daerah merupakan titik terang bagi hambatan yang dihadapi Indonesia.

Pelaksanaan Pilkadaes dengan *e-voting* oleh berbagai daerah bersandar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dengan resmi melegalkan *e-voting* sebagai salah satu metode dalam melakukan pemilihan kepala daerah, dimana sebelumnya pemilihan hanya dapat dilakukan dengan cara mencoblos atau metode konvensional. Pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa metode *e-voting* dapat digunakan asal memenuhi syarat 1) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan 2) daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Untuk memperkuat Putusan MK ini, klausul penggunaan *e-voting* dimasukkan ke dalam UU Pilkada.

⁶² Slamet Risnanto dkk., "E-voting Readiness Mapping for General Election Implementation," *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 98, no. 20 (31 Oktober 2020): 3280–90. h. 3285-3286

Berdasarkan pernyataan di atas, secara hukum, metode *e-voting* dapat digunakan, namun hanya pada tingkat daerah. Karena undang-undang yang mengatur *e-voting* hanya ada pada UU Pilkada, tidak pada UU Pemilu. Oleh karena itu, dengan memperhatikan jalannya pelaksanaan Pilkadaes yang sukses menerapkan *e-voting* dapat menjadi rujukan bagi para *stakeholder* untuk menyusun kebijakan yang khusus mengatur tentang *e-voting*, termasuk Peraturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya.

Secara umum terdapat sembilan aspek yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam menyusun kerangka hukum penggunaan mesin *e-voting* dalam pemilu;⁶³

- a. Aspek Fisik Proses Digitalisasi Pemilu
- b. Aspek Prosedur yang Transparan
- c. Uji Coba dan Sertifikasi
- d. Mekanisme Audit
- e. Status Hasil Audit dan Hasil Elektronik
- f. Keamanan dan Penyimpanan Data
- g. Identifikasi Pemilih
- h. Akses kepada *Source Code*
- i. Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Penerapan Teknologi

2. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu komponen yang harus terpenuhi sebelum memilih untuk menerapkan *e-voting* pada pemilihan di tingkat lebih tinggi. Meningkatnya kepercayaan publik, maka akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan pemilu menjadi tonggak utama untuk mewujudkan martabat demokrasi pada konsep negara hukum Indonesia.

⁶³ Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu, ed. oleh Antony Lee (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019). h. 71-72

Pelaksanaan Pilkades dengan metode *e-voting* di berbagai daerah mendapat kesan positif dari publik. Pasalnya penggunaan sistem *e-voting* memakan waktu lebih sedikit, memberikan kemudahan akses bagi para pemilih terutama pemilih disabilitas, hasil dapat langsung diketahui dan disaksikan tanpa perlu melakukan perhitungan, mengurangi biaya operasional, mencegah pemilih ganda, dan menghindari peluang terjadinya kecurangan.

Terlepas dari segala kelebihan yang didapat ketika menggunakan *e-voting*, kelemahan *e-voting* mengenai keamanan menjadi pertanyaan publik. Melihat semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa sistem ini rentan terhadap serangan siber seperti peretasan, manipulasi data, dan pencurian identitas pemilih.

Untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik, Indonesia dapat belajar pada pemilu Brazil. Di Brazil, enam puluh hari sebelum pemilu, dilakukan upacara yang menghadirkan perwakilan partai politik dan perwakilan masyarakat sipil. Selama upacara berbagai kegiatan pengamanan perangkat lunak pada mesin *e-voting* dilakukan, mulai dari pembuatan tabel fungsi *hash*, penandatanganan digital terhadap versi terkompilasi dari perangkat lunak, pemeriksaan integritas perangkat lunak yang telah diunggah ke mesin *e-voting*, sampai pada enkripsi dan penyegelan perangkat lunak. Semua kegiatan ini dilakukan di hadapan perwakilan partai politik dan masyarakat sipil, yang pada intinya bertujuan untuk mendapat dan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Infrastruktur Teknologi

Teknologi *e-voting* yang digunakan pada Pilkades di Indonesia antara lain, mesin verifikasi *e-KTP* dengan teknologi biometrik, laptop, CPU, PC dengan kemampuan *touch screen*, mesin pembaca *smartcard*, mesin audit, dan LCD Proyektor. Keseluruhan teknologi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang agar mereka dapat beroperasi dengan lancar. Kesuksesan *e-voting* pada Pilkades di berbagai daerah menandakan bahwa teknologi yang digunakan aman. BPPT juga mengklaim bahwa teknologi

mereka sudah siap sepenuhnya dan teknologi akan dioperasikan secara *offline* sehingga akan terhindar dari serangan siber. Karena teknologi yang digunakan terbukti aman, maka yang menjadi persoalan adalah infrastruktur teknologi tersebut, dimana infrastruktur kurang bahkan tidak memadai di daerah terpencil karena tidak terjangkau oleh listrik, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi *e-voting*.

Indonesia sebagai negara dengan letak geografis yang sangat strategis menjadikannya sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh teknologi dikarenakan infrastruktur yang kurang bahkan tidak memadai. Sementara di sisi lain, kepadatan jumlah penduduk Indonesia menjadikan tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk menerapkan *e-voting*.

Pada aspek ini, Indonesia bisa merujuk pada teknologi *e-voting* yang digunakan Brazil, yang didesain khusus hanya untuk pemilu. Teknologi tersebut berupa mikro komputer yang tidak bergantung pada suplai listrik karena menggunakan baterai dan juga beroperasi secara *offline* sehingga terhindar dari serangan siber. Ketika Indonesia berhasil mengadopsi teknologi *e-voting* Brazil ini, maka daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh listrik sudah bisa menerapkan *e-voting* ketika pemilihan.

4. Sumber Daya Manusia

Indonesia saat ini berada dalam era *society* 4.0. Pada era ini manusia mengadopsi teknologi canggih dan otomatisasi untuk berbagai bidang kehidupan. Keadaan ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menerapkan *e-voting*. Indonesia memanfaatkan peluang itu dan berhasil menggunakannya di bidang pemerintahan. Kesuksesan Pilkadaes dengan metode *e-voting* adalah bukti keberhasilan tersebut. Karena dari aspek teknologi Indonesia telah siap, BPPT sebagai pakar teknologi juga mengklaim bahwa teknologi mereka aman. Maka, terdapat wacana untuk menerapkan *e-voting* pada tingkat pemilu. Akan

tetapi, apabila diterapkan pada tingkat pemilu tentunya melibatkan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sementara sebanyak 57 juta warga negara Indonesia masih gagap teknologi.⁶⁴

Untuk menyukseskan wacana penerapan *e-voting* pada tingkat pemilu, tidak cukup hanya dengan infrastruktur teknologi, tetapi juga pemahaman teknologi. Pemahaman terhadap teknologi tidak hanya diperuntukkan untuk pemilih, tetapi juga untuk para *stakeholder* dan petugas pemilihan. Pemahaman teknologi yang dimaksud tidak hanya pada pemahaman teknis, agar masyarakat dapat menggunakan teknologi sesuai fungsinya. Melainkan, lebih daripada itu, pemahaman teknologi yang lebih dapat mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi dengan tujuan-tujuan yang berlawanan dengan kepentingan publik.⁶⁵

Pemahaman teknologi terhadap para *stakeholder*, petugas pemilihan, dan masyarakat, dapat diberikan dengan menggunakan model kesiapan transformasi digital yang terdiri dari tiga tahap, antara lain *envision* (bayangan), *enable* (kemungkinan), dan *enact* (pelaksanaan). Berdasarkan konteks tersebut, untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia terhadap *e-voting*, KPU sebagai penyelenggara pemilu, setidaknya melakukan tiga hal ini; yaitu 1) *envision* yang dilakukan dengan menyebarluaskan dan mengenalkan *e-voting* secara luas, terencana, dan sistematis, 2) *enable* diwujudkan melalui penyusunan peta jalan (*roadmap*) strategi penerapan *e-voting* serta identifikasi faktor-faktor utama, baik internal maupun eksternal, yang menentukan keberhasilannya, dan 3) *enact* yang dilakukan dengan mengajukan proyek *e-voting* kepada *stakeholder* terkait.⁶⁶

⁶⁴ Tim, “57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet,” *CNN Indonesia*, 1 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet>.

⁶⁵ Arif Susanto, “Tantangan Penyelenggaraan E-voting: Isu Kepercayaan Publik dan Integritas Pemilu,” *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 11, no. 2 (2024): 129–42. h. 135-136

⁶⁶ Anta Ibnul Falah dan Kurnia Rheza Randy Adinegoro, “Peluang dan Tantangan Adopsi E-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” *Responsive* 5, no. 3 (2022): 159–71. h. 166

BAB IV

PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-VOTING* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah lahir dari keberadaan *fiqh siyasah* dengan menjadi salah satu ruang lingkup kajiannya. Oleh karena itu, tidak elok jika mengenalkan *siyasah dusturiyah* tanpa memahami pengertian dari *fiqh siyasah*.

Kata *fiqh* secara bahasa berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqihan* yang artinya faham. Sedangkan secara istilah istilah, menurut Ulama Ushul, *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dengan demikian, ditarik pengertian *fiqh* sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia, yang diturunkan dari dalil-dalilnya yang rinci, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang disusun dengan bantuan ijtihad.⁶⁷

Sementara kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Sedangkan secara istilah, dalam Lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Jadi, *siyasah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.⁶⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan serta konsep pengelolaannya berdasarkan syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ Adinda Dwi Putri dkk., "Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam ,," MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2024). h. 219

⁶⁸ Fatmawati, FIKIH SIYASAH, ed. oleh Muhammad Shuhufi (Gowa: Pusaka Almaida, 2015). h. 1-3

⁶⁹ Syaiful Amri, DIKTAT FIQH SIYASAH, 2023. h. 2

Selanjutnya pengertian *dusturiyah*, kata *dusturiyah* secara etimologis berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi asas, dasar, atau pedoman. Secara terminologi, *dusturi* mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur prinsip dasar serta hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁷⁰

Menurut Abul A'la al-Maududi, *dusturi* merupakan dokumen yang berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai dasar dalam pengaturan suatu negara. Oleh karena itu, *dusturiyah* dapat diartikan sebagai norma hukum yang bersifat mendasar dan menjadi acuan utama bagi seluruh peraturan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini setara dengan *constitution*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai undang-undang dasar.⁷¹

Gambaran definisi kata per kata di atas, menyimpulkan pengertian bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang secara umum membahas aspek perundang-undangan dalam suatu negara. Secara prinsip, para ahli hukum Islam memiliki pandangan dan definisi yang hampir serupa mengenai konsep ini. Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa *siyasah dusturiyah* menjadi dasar bagi seluruh regulasi negara, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya, yang harus bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, seluruh aturan dalam negara harus didasarkan pada hukum syariat yang berakar dari akidah Islam, dengan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pelengkap.⁷²

⁷⁰ Hamzah Kamma, *FIQH SIYASAH*(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani), ed. oleh Moh. Mujibur Rohman (MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023). h. 140

⁷¹ Hamzah Kamma, *FIQH SIYASAH*(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani), ed. oleh Moh. Mujibur Rohman (MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023). h. 55

⁷² Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>. h. 3

B. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Atjep Jazuli menganalisis ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* ialah tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga di dalamnya. Namun karena terlalu luas, maka kajian *siyasah dusturiyah* difokuskan pada bidang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Lebih detailnya, berikut pembagian ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* oleh Atjep Juzali:⁷³

1. Imamah

Imamah dalam *fiqh siyasah* sering dikaitkan dengan khalifah atau amir. Oleh karena itu, istilah imamah diartikan sebagai kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Menurut Ibnu Khaldun, imamah bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat, serta melindunginya dari kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Tamiyah, imamah adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menyuarakan nilai-nilai ketuhanan dan tujuan utama syariat, serta melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi umat yang dipimpinnya.⁷⁴

2. Rakyat

Al-Maududi membahas konsep rakyat dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat sistem pemikiran dan pedoman hidup bagi manusia yang bertujuan untuk membangun sebuah negara berdasarkan ideologinya. Oleh karena itu, Islam membagi kewarganegaraan menjadi dua jenis, yaitu Muslim dan Dzimmi. Dalam hal ini, Islam secara tegas dan transparan

⁷³ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (29 April 2022): 150, <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>. h. 154

⁷⁴ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>. h. 3-4

membedakan status warganya dalam struktur politik tanpa menyamakannya dengan istilah lain.

Ibnu Khatir menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan golongan orang-orang beriman dan membaginya menjadi dua kelompok. Pertama, kaum Muhajirin, yaitu mereka yang meninggalkan tanah kelahiran dan harta benda mereka demi membela Allah SWT, Rasul-Nya, dan menegakkan agama Islam. Kedua, kaum Ansar, yakni penduduk Madinah yang beriman dan memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dengan menyediakan tempat tinggal serta mendukung perjuangan mereka. Selain itu, kaum Ansar turut berjihad bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaum Muhajirin dan Ansar memiliki hak perlindungan yang istimewa dibandingkan kelompok lainnya.

Sedangkan Dzimmi adalah setiap individu non-Muslim yang tetap setia dan mematuhi peraturan negara Islam tempat mereka tinggal, tanpa memandang negeri asal kelahiran mereka. Islam memberikan jaminan untuk melindungi kehidupan, kekayaan, kebudayaan, keyakinan, serta kehormatan mereka.⁷⁵

3. Baiat

Secara umum, baiat diartikan sebagai sebuah perjanjian. Kepala negara yang terpilih harus mendapatkan baiat dari seluruh umat Islam, baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Tujuan baiat adalah untuk mengikat kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya, sekaligus memastikan bahwa pemimpin tersebut akan melaksanakan amanat dan kepercayaan rakyat sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam sejarah Islam, praktik baiat memiliki variasi yang disesuaikan dengan kepentingan saat itu. Para sahabat yang memberikan baiat kepada Rasulullah SAW juga tidak selalu mengucapkan kalimat yang sama, kecuali

⁷⁵ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>. h. 158

dalam kondisi dan tujuan yang serupa. Konsep baiat yang ada mencerminkan pengakuan penuh masyarakat terhadap pemimpinnya. Baiat dianggap sangat penting karena keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin negara memerlukan dukungan penuh dari rakyatnya. Dengan demikian, baiat juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pengkhianatan di masa depan, baik oleh sebagian maupun seluruh masyarakat.⁷⁶

4. *Ahl al-hall wa al-aqd*

Kelompok *ahl al-hall wa al-aqd* memainkan peran yang sangat penting dalam mewakili umat Muslim dalam mengelola urusan pemerintahan dan memenuhi aspirasi politik mereka. Mereka adalah individu-individu yang memiliki keahlian dan wewenang untuk mengambil keputusan serta menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan umat Muslim. Salah satu peran utama kelompok ini adalah dalam proses pembaiatan terhadap calon khalifah yang memenuhi syarat. Proses pembaiatan ini memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat otoritas khalifah serta memperoleh dukungan dan persetujuan dari umat Muslim.⁷⁷

5. *Wizarah*

Wizarah adalah elemen penting dalam struktur pemerintahan Islam, dikarenakan keberadaannya adalah untuk membantu kepala negara dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan. Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut disebut wazir. Dalam sejarah Islam, saat Nabi SAW menjadi kepala negara, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali lah yang membantu tugas kenegaraan tersebut. Sistem dan praktek ini berlanjut pada masa dinasti Bani

⁷⁶ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>. h. 10-11

⁷⁷ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, ed. oleh Nur Azizah Rahma (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023). h. 71

Abbasiyah dan Bani Umayyah. Pada periode ini, para wazir berfungsi sebagai perwakilan khalifah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai departemen.⁷⁸

Di samping itu, ada pula pandangan yang membagi *siyasaḥ dusturiyah* menjadi empat jenis, yaitu:⁷⁹

1. Konstitusi

Dalam bidang konstitusi, *siyasaḥ dusturiyah* membahas berbagai sumber dan metode pembuatan undang-undang. Sumber-sumber tersebut adalah sumber materil, sumber sejarah, dan sumber penafsiran. Inti dalam sumber-sumber tersebut adalah peraturan tentang pemerintah dan rakyat. Perumusan konstitusi harus memperhatikan latar belakang dan sejarah dari negara yang bersangkutan, baik dari masyarakatnya, politiknya maupun budayanya, sehingga tercipta undang-undang yang sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat negara tersebut.

2. Legislasi

Legislasi merujuk pada kekuasaan legislatif, dalam pemerintahan Islam dikenal dengan *al-sulṭah al-tasyri'iyah*. Kekuasaan ini berkaitan dengan pembentukan dan penyusunan hukum sebagai salah satu bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan negara. Selain kekuasaan legislatif, terdapat juga kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qadhāiyyah*).

3. Ummah

Menurut Ali Syari'ati, ummah memiliki tiga konsep, yaitu gerakan, tujuan, dan kesadaran yang telah ditetapkan. Ummah juga dapat diartikan

⁷⁸ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâṣah," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>. h. 9

⁷⁹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, ed. oleh Nur Azizah Rahma (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023). h. 58-63

sebagai sekelompok orang yang berjuang menuju tujuan yang jelas. Dalam istilah makiyyah dan madaniyyah, ummah merujuk pada sekelompok orang yang menganut agama tauhid, termasuk orang-orang kafir dan seluruh umat manusia.

4. Syura atau Demokrasi

Kata syura berasal dari kata *syawara-musyawaratan* yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui forum perundingan untuk mencapai kebaikan. Dalam Islam, tidak diatur mengenai tata cara bermusyawarah. Oleh karena itu, perancangan teknis musyawarah diserahkan sepenuhnya kepada manusia berdasarkan kepentingan dan kebutuhan saat itu.

Demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan diberikan untuk rakyat. Prinsip ini mengharuskan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa. Muhammad Iqbal menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan konsep syura dalam Islam. Prinsip pertama adalah tauhid yang menjadi dasar utama untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Prinsip kedua adalah ketaatan terhadap hukum yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ketiga adalah adanya toleransi antar sesama warga negara dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Prinsip keempat adalah demokrasi Islam tidak dibatasi oleh faktor geografis, ras, warna kulit, atau bahasa. Prinsip kelima adalah penafsiran terhadap hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.

Kajian *siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal utama; pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Dalil-dalil ini tidak akan pernah berubah meskipun terjadi perubahan pada masyarakat, karena dalil-dalil inilah yang menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-

aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya.⁸⁰

C. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah sebagai ilmu yang membahas masalah perundang-undangan negara dan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat), yang harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi sosial masyarakat agar undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan. Sementara untuk prinsip pada *nash*, Muhammad Salim Awwa menguraikan ada lima prinsip dalam *nash* yang diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu:⁸¹

1. Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Prinsip musyawarah menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, jadi pemerintah Muslim diharapkan mendengarkan pendapat rakyat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan)

Prinsip keadilan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak memihak dan pemberian hukuman yang sesuai dengan kesalahan.

⁸⁰ Hasni Saskia, "Kewenangan Legislasi dari Eksekutif Ke Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). h. 28

⁸¹ Rodiatas Shofiyah dkk., "Prinsip-Prinsip Fiqih *Siyasah* dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 84–93. h. 87-90

3. Prinsip *Huriyyah* (Kebebasan)

Prinsip kebebasan menekankan kewajiban pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik, dan hak-hak lainnya.

4. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara.

5. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menekankan pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Hal ini dapat dilihat melalui akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.

D. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerapan Sistem *E- Voting* pada Penyelenggaraan Pemilu

Sistem *e-voting* adalah salah satu mekanisme pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Kajian sistem *e-voting* dalam Islam masuk ke dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, khususnya pengambilan keputusan sesuai syariat (musyawarah).

Saat ini Indonesia menggunakan dua mekanisme musyawarah untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, yaitu mekanisme konvensional dengan menggunakan kertas suara dan mekanisme *e-voting* dengan menggunakan perangkat elektronik. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Islam tidak mencantumkan metode musyawarah secara baku, tapi diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia untuk dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan tanpa melanggar syariat. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan khulafaurrasyidin, pasca Rasulullah SAW wafat. Khalifah Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin atas kesepakatan dan musyawarah oleh sahabat, khalifah Umar bin Khattab dipilih melalui penunjukkan yang dilakukan oleh Abu Bakar, khalifah

Usman bin Affan dipilih oleh sekelompok orang yang telah disepakati oleh Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas, maka sistem *e-voting* dapat dianggap sebagai inovasi modern yang sejalan dengan semangat musyawarah.dalam Q.S. Asy-Syuara ayat 38:

ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

Kata “urusan” di atas merujuk pada semua urusan duniawi, termasuk juga sistem *e-voting* yang merupakan salah satu cara pengambilan keputusan dengan menggunakan perangkat elektronik.

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ada enam prinsip yang dijadikan landasan untuk semua kebijakan di suatu negara, termasuk kebijakan *e-voting*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan amanah. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Bunyi pasal ini merupakan asas-asas yang harus terpenuhi selama pelaksanaan pemilu. Pemenuhan asas-asas ini dalam setiap tahapan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga

⁸² Maulidiah Fathimah Azzahrah, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). h. 68-69

penghitungan dan perolehan hasil suara akan menciptakan pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas menunjukkan kualitas demokrasi suatu negara mengingat pemilu merupakan perwujudan dari negara demokratis.

Sistem *e-voting* yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 secara sah dianggap sebagai salah satu sistem pemilu dan diperbolehkan untuk digunakan asal tidak melanggar ke-enam asas pemilu di atas. Untuk memenuhi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* sekaligus menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berikut diuraikan pemenuhan asas pemilu dalam penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu:

1. Langsung, asas ini memiliki makna bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. Pada penerapan sistem *e-voting*, asas ini dijalankan dengan cara pemilih juga datang langsung ke TPS untuk melakukan pemberian suara pada mesin *e-voting*.
2. Umum, asas ini memiliki makna bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa didiskriminasi. Pada penerapan sistem *e-voting*, asas ini dijalankan dengan cara memeriksa persyaratan pemilih melalui teknologi pembaca *e-KTP*.
3. Bebas, asas ini memiliki makna bahwa pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pada penerapan sistem *e-voting*, asas ini dijalankan dengan cara pemilih secara bebas memberikan suara untuk kandidat pilihannya pada mesin *e-voting*. Mesin *e-voting* juga menyediakan pilihan suara kosong bagi mereka yang tidak ingin memilih.
4. Rahasia, asas ini memiliki makna bahwa pilihan pemilih merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Pada penerapan sistem *e-voting*, asas ini dijalankan dengan cara diletakkannya mesin *e-voting* pada bilik suara untuk menutupi pemilih ketika memberikan suara, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. *V-token* yang digunakan untuk mengaktifkan mesin *e-voting* juga

tidak menyimpan data pemilih sehingga identitas pemilih tidak diketahui ketika memberikan suara pada mesin *e-voting*.

5. Jujur, asas ini memiliki makna bahwa proses pemilihan harus dilaksanakan dengan jujur, tanpa kecurangan atau manipulasi, baik itu oleh pemilih, penyelenggara, maupun *stakeholder*. Pada penerapan sistem *e-voting*, teknologi yang terenkripsi dengan baik akan mencegah berbagai bentuk kecurangan, baik itu memilih lebih dari satu kali, memilih dua kandidat sekaligus, memanipulasi perolehan suara, dan kecurangan lainnya.
6. Adil, asas ini memiliki makna bahwa peserta pemilihan diberlakukan sama dan setara. Pada penerapan sistem *e-voting*, asas ini dijalankan dengan cara keseluruhan perangkat *e-voting* di-*setting* sama untuk semua peserta pemilihan.

Sistem *e-voting* yang memanfaatkan perangkat elektronik mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi suara, sampai transmisi hasil suara memberikan keuntungan yang signifikan bagi sebuah negara yang merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, serta tujuan *siyasah dusturiyah* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

Keuntungan tersebut, pertama, menggantikan sistem konvensional dengan menggunakan sistem *e-voting* pada pemilu akan mengefisienkan waktu pemungutan suara. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem konvensional dilakukan secara manual. Pemilih datang ke TPS dengan membawa KTP dan surat pemberitahuan kemudian diperlihatkan kepada petugas pemilihan untuk didata. Pendataan dilakukan dengan mencocokkan identitas pemilih dengan data DPT yang dipegang oleh petugas pemilihan, apabila terkonfirmasi cocok maka dilakukan penandatanganan oleh pemilih sebagai bentuk absensi dan bukti sudah memilih. Cara manual ini memakan banyak waktu, terlebih lagi jika terjadi *human error* oleh petugas pemilihan yang dapat mengacaukan jalannya pemilu. Sedangkan jika menggunakan *e-voting* pemilih hanya perlu menempelkan *e-KTP* dan mengidentifikasi sidik jari pada alat verifikasi yang disediakan. Alat secara

otomatis akan mencocokkan identitas pemilih pada aplikasi DPT yang dioperasikan oleh petugas pemilihan. Aplikasi juga secara otomatis mengabsen pemilih tersebut tanpa perlu melakukan tanda tangan.

Tidak hanya pada tahap verifikasi yang memakan waktu, tahap pemberian dan perhitungan suara juga memakan waktu. Pada sistem konvensional pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos kandidat pilihan pada kertas suara. Sedangkan sistem pemilu Indonesia yang rumit menjadikan pemberian pada kertas suara juga rumit. Pemilu di Indonesia melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD) yang dilakukan secara bersamaan sekaligus. Pada pemilihan legislatif melibatkan banyak partai dan banyak calon sehingga menjadikan kertas suara mau tidak mau berukuran besar untuk memuat partai dan para calonnya. Mekanisme pemilu di Indonesia ini menjadikan pemberian suara menggunakan kertas suara tidak efisien. Pemberian suara dengan membuka dan membaca kertas suara satu per satu memakan banyak waktu. Desain kertas suara pada pemilihan legislatif yang hanya mencantumkan logo, nama, dan calon perwakilan partai juga tidak relevan bagi mereka dengan kemampuan literasi yang rendah. Lain cerita ketika menggunakan *e-voting*, pemilih hanya perlu menekan tombol sesuai arahan yang diberikan pada mesin, dan mesin secara otomatis merekam suara yang dipilih.

Tahap perhitungan suara dengan sistem konvensional dilakukan dengan membuka kertas suara satu persatu untuk mengetahui perolehan suara sah dan suara tidak sah. Perhitungan dengan cara manual ini memakan banyak waktu. Sedangkan ketika menggunakan *e-voting* perolehan suara akan dihitung oleh mesin secara otomatis dan hasil perolehan suara bisa langsung diketahui.

Kedua, selain efisien dalam hal waktu, penggunaan *e-voting* juga akan mengefisienkan biaya. Sebagaimana penjelasan di atas, penggunaan kertas suara untuk pemilihan anggota legislatif saja membutuhkan empat kertas suara, belum lagi perlengkapan lain yang hanya digunakan satu kali kemudian dibuang. Hal ini

sangat tidak efisien dalam hal biaya. Oleh karena itu, penggunaan *e-voting* merupakan solusi karena tidak perlu mencetak kertas suara yang sangat banyak. Mungkin pada awal penerapannya adopsi sistem *e-voting* akan memakan sangat banyak biaya dikarenakan perangkat elektronik yang harus terpenuhi di setiap daerah. Namun, untuk pemilihan pada periode selanjutnya mesin dapat digunakan kembali sehingga tidak terlalu banyak menggunakan biaya dibandingkan harus mencetak kertas suara yang baru dengan jumlah seluruh pemilih di Indonesia.

Ketiga, kurangnya campur tangan manusia pada sistem *e-voting* akan mencegah segala bentuk kecurangan yang bisa saja dilakukan baik oleh pemilih, tim sukses maupun petugas pemilihan yang bersekutu dengan para calon. Misal, mesin verifikasi pada *e-voting* secara otomatis mampu mendeteksi pemilih yang sudah melakukan pemberian suara dan ingin melakukan lagi, serta mesin voting didesain hanya bisa memilih satu kandidat, tidak lebih dari satu.

Keempat, penggunaan *e-voting* pada perhitungan suara akan memperoleh hasil yang lebih akurat dikarenakan dilakukan oleh mesin yang sudah terintegritas, dibandingkan dilakukan oleh manusia yang pada keadaan tertentu kurang teliti sehingga diharuskan untuk melakukan perhitungan ulang suara. Oleh karena itu, selama pada tahap registrasi data DPT tidak kacau maka keakuratan hasil perhitungan suara bisa terjamin.

Kelima, penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu akan meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat Indonesia sekarang berada pada era *society 4.0* dimana masyarakat cenderung menggunakan teknologi digital dengan sistem otomatisasi hampir pada semua bidang kehidupan. Sehingga penerapan sistem *e-voting* akan dianggap lebih praktis. Mesin voting yang mencantumkan foto kandidat juga memudahkan pemilih tunarungu. Mesin pemilih untuk penyandang disabilitas juga disediakan pada sistem ini. Kemudahan ini akan meningkatkan partisipasi pemilih.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

- A. Satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan, badan penyelenggara Pemilu Brazil mengajukan rancangan resolusi ke parlemen untuk memperbarui undang-undang Pemilu. Setelah pengajuan, maka dilakukan revisi terhadap sistem *e-voting* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam resolusi yang telah disetujui. Kemudian 60 hari sebelum pemilihan, dilakukan upacara yang menghadirkan perwakilan partai dan masyarakat sipil untuk menyaksikan pengamanan pada perangkat lunak mesin *e-voting*, yang kemudian didistribusikan ke badan penyelenggara Pemilu Negara Bagian. Beberapa hari sebelum pemilihan, setiap badan penyelenggara Pemilu Negara Bagian memuat sistem dengan informasi kandidat, daftar pemilih, dan aplikasi perangkat lunak. Perwakilan partai politik diwajibkan menghadiri proses pemuatan ini. Mesin *e-voting* yang digunakan Brazil didesain khusus untuk Pemilu, berupa mikro komputer yang terdiri dari dua panel, panel untuk pemilih dan panel untuk petugas pemilihan, beroperasi secara *offline* dan menggunakan baterai. Pelaksanaan Pemilu menggunakan *e-voting* di Brazil dilakukan seperti Pemilu pada umumnya yang dimulai dengan registrasi *e-KTP* dan sidik jari pada panel yang dioperasikan oleh petugas pemilihan, kemudian menuju ke bilik suara untuk memberikan suara pada panel untuk pemilih.
- B. Kesiapan sistem *e-voting* di Indonesia diukur dari empat aspek. Pertama, aspek hukum dan kebijakan, Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur tentang sistem *e-voting*, termasuk Peraturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya. Daerah-daerah di Indonesia masih menggunakan Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai payung hukum untuk melaksanakan *e-voting*. Kedua, aspek kepercayaan publik, Indonesia bisa mencontoh Brazil yang melakukan pengamanan perangkat lunak di

hadapan perwakilan partai dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap mesin *e-voting*. Ketiga, aspek infrastruktur teknologi, suksesnya pelaksanaan *e-voting* pada Pilkadaes di Jembrana dan daerah-daerah lainnya menandakan bahwa teknologi *e-voting* yang digunakan aman. Untuk permasalahan infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil, Indonesia bisa mengadopsi mesin *e-voting* Brazil yang menggunakan baterai dan tidak bergantung pada suplai listrik. Keempat, aspek sumber daya manusia, pemahaman teknologi terhadap para *stakeholder*, petugas pemilihan, dan masyarakat, dapat diberikan dengan tahapan *envision*, *enable*, dan *enact*.

- C. Sistem *e-voting* jika dilakukan dengan berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, amanah, serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, dan kemudian dikaitkan dengan mekanisme musyawarah dalam Islam tentu tidak ada pelarangan yang tegas, mengingat Islam sendiri tidak memiliki aturan baku terkait tata cara musyawarah, sebagaimana musyawarah pada masa khulafaurrasyidin yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Namun jika prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaannya dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur umat manusia agar tercapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Saran

- A. Indonesia bisa mencontoh upacara pengamanan perangkat lunak yang dilakukan Brazil dengan melibatkan perwakilan partai dan masyarakat untuk memenuhi aspek kepercayaan publik, dan Indonesia bisa mengadopsi mesin *e-voting* Brazil yang menggunakan baterai untuk menyelesaikan kendala pada aspek infrastruktur teknologi yang tidak memadai pada daerah terpencil.
- B. Pemerintah harus segera menyusun regulasi mengenai sistem *e-voting*, terutama Peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraannya, meskipun baru diterapkan pada tingkat Pilkadaes.
- C. Pakar teknologi harus mengenkripsi mesin *e-voting* dengan baik agar prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat terpenuhi, karena kunci dari integritas pemilu menggunakan sistem *e-voting* ada pada mesin *e-voting* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amri, Syaiful. *DIKTAT FIQH SIYASAH*, 2023.

Ardianti, Evi. "Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Avgerou, Chrisanthi. "Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E-Voting in Brazil." *Journal of the Association for Information Systems* 14, no. 8 (2013).

Azmi, Khurin Ainun. "Studi Komparatif Kitab Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah karya Syaikh al-Usaimin dengan Kitab Syarah Mukhtar al-Ahadis Karya KH. Moch. Anwar dan Dkk Dalam Telaah Kitab Hadis." IAIN Kudus, 2022.

Azzahrah, Maulidyah Fathimah. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem *E-voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Chikmawati, Luluk. "Perbandingan Konsep Demokrasi antara Jimly Asshddiqie dan Yusuf Al Qaradhawi." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

"Daftar negara menurut jumlah penduduk." Dalam *WIKIPEDIA*, 2024.

Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Aevida Kartini. *Memahami E-voting Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Falah, Anta Ibnul, dan Kurnia Rheza Randy Adinegoro. "Peluang dan Tantangan Adopsi *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Responsive* 5, no. 3 (2022): 159–71.

Fatmawati. *FIKIH SIYASAH*. Disunting oleh Muhammad Shuhufi. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.

Faturrahman, Andy Rizki. "Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-voting* Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

- Fuadi, Abdul Basid. "Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hadipratama, Muhammad Febryan. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Disiplin Kerja Serta Keadaan Lingkungan Kerja Terhadap Persepsi Kualitas Kinerja Guru Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 03 dan 011 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara)." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran*. Disunting oleh Nur Khasanah. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Hartami, Aprilia, dan Putu Wuri Handayani. *ECEG2012-Proceedings of the 12th European Conference on e-Government: ECEG*. Disunting oleh Mila Gasco. Vol. 1. Barcelona: Academic Publishing International Limited, 2012.
- Hebatullah, Haniefa. "Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Di Indonesia," 2021.
- Hidalgo, Fernando Daniel. *Renovating Democracy: The Political Consequences of Election Reforms in Post-War Brazil*. UC Berkeley, 2012.
- Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfa, dan Poppy Belladonna. "Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi 'Sehat.'" *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 110–23. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i2.25>.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Hompimpa!* "Penerapan E-voting Dan E-Counting Pada Pemilu Di 7 Negara, Bagaimana Hasilnya?" Februari 2017. <http://www.hompimpa.id/2017/02/e-voting-dan-e-counting.html>.
- Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH KONSTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Isnanto, Bayu Ardi. "Teknologi Informasi: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Prediksi Masa Depan." *detikedu*, 23 Juli 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6837518/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-contoh-dan-prediksi-masa-depan>.

- Kamma, Hamzah. *FIQH SIYASAH(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Disunting oleh Moh. Mujibur Rohman. MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Karmanis. “Electronic-Voting (E-Voting) dan Pemilihan Umum.” *Mimbar Administrasi* 18, no. 2 (2021): 11–24. <http://dx.doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526>.
- Kaspari, Ariedi. “Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Penerapan Sistem *E-voting* Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.” Universitas Andalas, 2023.
- Kliwanto, D.Dj. “*E-voting* Dari Kacamata Regulasi dan Keamanan Siber.” *ANTARA*, 26 Maret 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2783521/e-voting-dari-kacamata-regulasi-dan-keamanan-siber>.
- Konstitusi Republik Federatif Brasil (t.t.).
- Kusmayadi, Eka. *Pengenalan Teknologi Informasi*. 3 ed. KAJIAN SOFTWARE, 2021.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH*. Disunting oleh M. Harir Muzakki. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Lubis, Mhd. Anzor, Wenggedes Frensh, dan Fitri Yanni Dewi Siregar. “Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.
- Mantalean, Vitorio, dan Diamanty Meiliana. “Cerita Bawaslu Pantau *E-voting* Brasil: Rekapitulasi Beres 5 Jam, KPPS Hanya Dibayar Makan Siang.” *KOMPAS.com*, 10 Oktober 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/18172041/cerita-bawaslu-pantau-e-voting-brasil-rekapitulasi-beres-5-jam-kpps-hanya>.
- Maurer, Ardita Driza, dan Jordi Barrat. *E-voting Case Law: A Comparative Analysis*. ASHGATE, 2016.
- Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (29 April 2022): 150. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*.

- Disunting oleh Nur Azizah Rahma. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Ongwen, Okuro. "Comparative Review of *E-voting* in India and Brazil: Key Lessons for Kenya." *Lagos Historical Review* 21, no. 1 (2021): 26–56.
- (Persero), Humas PT INTI. "Sukses Rampungkan Pilkades Elektronik pada Ribuan Desa, INTI Group Jadi Satu-Satunya Pemegang Legalitas Sistem e-Voting." *INTI*, 14 Juni 2023. <https://www.inti.co.id/?p=12076>.
- Pratama, Heroik M., dan Nurul Amalia Salabi. *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. Disunting oleh Antony Lee. Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019.
- Prayoga, Sandy. "Penggunaan *E-voting* dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022." *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 160–75.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (23 Januari 2024): 218–30. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.
- Putri, Ni Luh Wayan Cempaka Suandewi. "Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Partisipasi Pengguna, Kinerja Individu, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tegallalang." Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 (t.t.).
- Rachmanto, Adi, dan Yogi Riyan Aditama. "Pengaruh Teknologi Informasi, Kemampuan Pengguna Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)." *JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting* 2, no. 2 (2022): 74–94. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7492>.
- Ramadhanti, Dwi Novita. "Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik." *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (2022): 361–66. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>.
- Risnanto, Slamet, Yahaya Bin Abd Rahim, Nanna Suryana Herman, dan Abdurrohman. "*E-voting* Readiness Mapping for General Election Implementation." *Journal*

of Theoretical and Applied Information Technology 98, no. 20 (31 Oktober 2020): 3280–90.

Risnanto, Slamet, dan Yahaya Abd Rahum. “E-Voting: Technology Requirements Mapping.” *TEM Journal* 11, no. 3 (Agustus 2022): 1282–90. <https://doi.org/10.18421/TEM113-37>.

Saskia, Hasni. “Kewenangan Legislasi dari Eksekutif Ke Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Schneider, Rodrigo. “Free or Fair Elections? The Introduction of Electronic Voting in Brazil.” *ECONOMIA* 1, no. 21 (2020): 73–100.

slamet

Shofiyah, Rodiatu, Samuji, M. Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, dan Amir Bandar Abdul Majid. “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 84–93.

Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantara, Amelia Ayu Paramitha, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, dan Dara Pustika Sukma. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Susanto, Arif. “Tantangan Penyelenggaraan E-Voting: Isu Kepercayaan Publik dan Integritas Pemilu.” *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 11, no. 2 (2024): 129–42.

Syahada, Gianita. “Studi Komparatif Terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Syaifullah, Ananda. “Tahapan Pemilihan Elektronik.” *Indonesiabaik.id*, 2019. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik.

Tim. “57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet.” *CNN Indonesia*, 1 Februari 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet>.

Tribunal Superior Eleitoral, Brasil. *Practical Guide 2022 Brazilian Elections*. International Affair Unit, 2022.

- Ulfiyyati, Alifa, Ridho Muhamad, Mulki Fathur Barri, dan Ilham Sultan Akbari. "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–44. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (t.t.).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (t.t.).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (t.t.).
- Utami, Beta. "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Utami, Nidisa. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survei Pada Unit Akuntansi Keuangan Pada Bank BUMN Di Kota Bandung." Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- Vitor, Marchetti. "Electoral Governance in Brazil." *Brazilian Political Science Review* 6, no. 1 (2012): 113–33.
- Wibowo, Ari. "Implementasi Penerapan *E-voting* dalam Rangka Transformasi Digital pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, November 2023, 15–25.
- Wijaya, Junior Hendri, Achmad Zulfikar, dan Iman Amanda Permatasari. "Implementasi Sistem *E-voting* Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (2019): 51–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia." Universitas Islam Malang, 2023.

Yudha, Romadhona Kusuma. “Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem *E-voting* Di Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan.” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 1, no. 1 (2021): 41–49.







Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

Mensagem de veto
(Vide Decreto nº 7.791, de 2012)
(Vide ADIN Nº 5.889)

Estabelece normas para as eleições.

O VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de **PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Disposições Gerais

Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:

I - para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

II - para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de Governador.

Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§ 1º a 3º do artigo anterior.

Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).

Art. 5º Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.

Das Coligações

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

§ 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.

§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:

I - na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante;

II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso III;

III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:

a) três delegados perante o Juízo Eleitoral;

b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 5º A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.

§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação, observado o disposto no art. 13. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. [\(Vide ADIN - 2.530-9\)](#)

§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no *caput*, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.

Do Registro de Candidatos

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a doze, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.

§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no *caput*, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até trinta dias antes do pleito. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.

IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.

§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.

§ 6º A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no § 1º. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites aqueles que: [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

I - condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

II - pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites; [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

IV - o parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 9º A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 12. (VETADO) [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos III, V e VI do § 1º deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.

§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro;

II - ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;

III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior;

IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.

§ 2º A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor.

§ 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente.

§ 4º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos.

§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações, para uso na votação e apuração:

I - a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato;

II - a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.

§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.

Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral, após solicitação do partido.

Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios:

- I - os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados;
- II - os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à direita;
- III - os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita;
- IV - o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais.

§ 1º Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo.

§ 2º Aos candidatos a que se refere o § 1º do art. 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 3º Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número de legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16. Até vinte dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º Até a data prevista no **caput**, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no § 1º, inclusive com a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juizes suplentes pelos Tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no art. 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

(Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei; (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II do § 3º do art. 12 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 1º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 2º O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 3º Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral: (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

I - divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

II - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 7º Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 8º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 9º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 13. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 14. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

§ 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)

Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

I - 2% (dois por cento), divididos igualmente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

II - 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

IV - 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 2º Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 19. [\(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

§ 1º Os bancos são obrigados a: [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção; [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

III - encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no art. 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 4º Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no [art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#). [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

Art. 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º Cumprido o disposto no § 1º deste artigo e no § 1º do art. 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - [\(revogado\)](#); [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - [\(revogado\)](#); [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º-A [\(Revogado pela lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º-B - (VETADO) [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 28. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1º deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos: [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

a) identificação do doador; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos: [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

a) cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

b) identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um dos doadores e das quantias doadas; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

c) disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

d) emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

e) ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

f) não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no art. 24 desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

g) observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no § 2º do art. 22-A desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

h) observância dos dispositivos desta Lei relacionados à propaganda na internet; [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

V - comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 4º-A Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 4º-B As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do § 4º do art. 28 desta Lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 5º Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 6º Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 8º Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 9º As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;

III - concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

V - entidade de utilidade pública;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

VIII - entidades beneficentes e religiosas; [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

IX - entidades esportivas; [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

XI - organizações da sociedade civil de interesse público. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

XII - (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no art. 81. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 4º O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 24-A. (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 24-B. (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1º do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do [art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995](#); [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las-á à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3º do art. 38 desta Lei; [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e semelhantes;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;

XI - (Revogado); [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - (Revogado); [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

XIV - (revogado); [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País; [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha: [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10% (dez por cento); [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 2º Para os fins desta Lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

- a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)
- b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a alínea a deste parágrafo; [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)
- c) alimentação e hospedagem própria; [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)
- d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de três linhas [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas

Art. 28. A prestação de contas será feita:

- I - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
- II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do [Anexo desta Lei](#).

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem.

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet): [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 5º (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 7º As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o § 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 8º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 9º A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou por índice que o substituir. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 10. O sistema simplificado referido no § 9º deverá conter, pelo menos: [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

- I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)
- II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)
- III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9º e 10. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como transferência aos candidatos, ~~sem individualização dos doadores~~. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#) [\(Vide ADIN nº 5.394\)](#)

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

- I - [\(revogado\)](#); [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)
- II - resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas; [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)
- III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;
- IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2 (dois) turnos, até o vigésimo dia posterior à sua realização. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.

§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da diplomação. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.

§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 5º Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos [incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal](#). [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no [art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#), no que couber. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios: [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - no caso de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - no caso de candidato a Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual ou Distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no Estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

III - no caso de candidato a Presidente e Vice-Presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

IV - o órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente a suas contas.

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro; [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 34. (VETADO)

§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.

Art. 35-A. [\(Vide ADIN 3.741-2\)](#)

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.

§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. [\(Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017\)](#)

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 5º A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos; [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos; [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei. [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do **caput**, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 36-B. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1º do art. 13 da Constituição Federal. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 8.000,00 (oito mil reais). [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de: [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado). [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 38. Indepe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 4º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e casas de saúde;

III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreta;

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de uma; [\(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. [\(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 7º É proibida a realização de *showmício* e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante **outdoors**, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda traçado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

III - trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, disticos e adesivos. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das seções eleitorais. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Art. 40-A. **(VETADO)** [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juizes eleitorais e pelos juizes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. [\(Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999\)](#)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Da Propaganda Eleitoral mediante *outdoors*

Art. 42. **(Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)**

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa

Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. [\(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.

§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do art. 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito: [\(Vide ADIN 4.451\)](#)

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes: [\(Vide ADIN 4.451\)](#)

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

§ 1º A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.

§ 3º. [\(Revogado pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#) [\(Vide ADIN 4.451\)](#)

§ 5º Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#) [\(Vide ADIN 4.451\)](#)

§ 6º É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte: [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.

§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do debate.

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora.

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no art. 56.

§ 4º O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos trinta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º A propaganda será feita:

I - na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas às sete horas e doze minutos e trinta segundos e das doze horas às doze horas e doze minutos e trinta segundos, no rádio; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas às treze horas e doze minutos e trinta segundos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta e dois minutos e trinta segundos, na televisão; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

II - nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas e doze minutos e trinta segundos às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas e doze minutos e trinta segundos às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas e doze minutos e trinta segundos às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e dois minutos e trinta segundos às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, na televisão; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

III - nas eleições para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras: ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

a) das sete horas às sete horas e cinco minutos e das doze horas às doze horas e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas às treze horas e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e trinta e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

c) das sete horas às sete horas e sete minutos e das doze horas às doze horas e sete minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

d) das treze horas às treze horas e sete minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e trinta e sete minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

IV - nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e cinco minutos às sete horas e quinze minutos e das doze horas e cinco minutos às doze horas e quinze minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas e cinco minutos às treze horas e quinze minutos e das vinte horas e trinta e cinco minutos às vinte horas e quarenta e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

c) das sete horas e sete minutos às sete horas e dezesseis minutos e das doze horas e sete minutos às doze horas e dezesseis minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

d) das treze horas e sete minutos às treze horas e dezesseis minutos e das vinte horas e trinta e sete minutos às vinte horas e quarenta e seis minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

V - na eleição para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras: ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

a) das sete horas e quinze minutos às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas e quinze minutos às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas e quinze minutos às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e cinco minutos às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

c) das sete horas e dezesseis minutos às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas e dezesseis minutos às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

d) das treze horas e dezesseis minutos às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e seis minutos às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

VI - nas eleições para Prefeito, de segunda a sábado: ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

a) das sete horas às sete horas e dez minutos e das doze horas às doze horas e dez minutos, no rádio; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

b) das treze horas às treze horas e dez minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta minutos, na televisão; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

VII - ainda nas eleições para Prefeito, e também nas de Vereador, mediante inserções de trinta e sessenta segundos, no rádio e na televisão, totalizando setenta minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as cinco e as vinte e quatro horas, na proporção de 60% (sessenta por cento) para Prefeito e 40% (quarenta por cento) para Vereador. ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

§ 12-A Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso VII do § 12 nos Municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. ([Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do § 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: ([Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013](#)) (Vide ADI-5105)

I - 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integrem; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualmente. ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. ([Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006](#))

§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior.

§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.

§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no *caput*, obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente.

§ 7º Para efeito do disposto no § 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. ([Redação dada pela Lei nº 13.107, de 2015](#))

§ 8º As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - de 12 (doze) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 9º As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos II a VI do § 1º. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º [\(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º [\(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em dois blocos diários de dez minutos para cada eleição, e os blocos terão início às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta minutos, na televisão. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda deste iniciará-se imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.

§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualmente entre os candidatos.

Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 51. Durante o período previsto no art. 47 desta Lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão setenta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de trinta e de sessenta segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as cinco e as vinte e quatro horas, nos termos do § 2º do art. 47 desta Lei, obedecido o seguinte: [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

I - o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que compõem uma coligação, quando for o caso;

II - (revogado); [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as cinco e as onze horas, as onze e as dezoito horas, e as dezoito e as vinte e quatro horas; [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

IV - na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no art. 47. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 1º É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 2º Durante o período previsto no art. 49 desta Lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão, por cada cargo em disputa, vinte e cinco minutos para serem usados em inserções de trinta e de sessenta segundos, observadas as disposições deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do art. 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos.

§ 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes.

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha: [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

I - realizações de governo ou da administração pública; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

III - atos parlamentares e debates legislativos. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propaganda.

§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 (quinze) minutos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.

Art. 57. As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

Propaganda na Internet [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#) [\(Vide Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

~~Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)~~

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 3º O impulsionamento de que trata o **caput** deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º **(VETADO)** [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de quarenta e oito horas. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R\$ 100,00 (cem reais), por mensagem. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 2º Igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), as pessoas contratadas na forma do § 1º. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de vinte e quatro horas. [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

§ 1º A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 57-I desta Lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. [\(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)

Do Direito de Resposta

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data da formulação do pedido.

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:

I - em órgão da imprensa escrita:

a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;

b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira vez em que circular;

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas;

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta;

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;

II - em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:

a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do [art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo;

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;

III - no horário eleitoral gratuito:

- a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto;
- b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
- c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;
- d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
- e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;
- f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

IV - em propaganda eleitoral na internet: [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

- a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa; [\(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017\)](#)
- b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva; [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)
- c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar réplica.

§ 5º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em vinte e quatro horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 6º A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de vinte e quatro horas, observando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso III do § 3º para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso.

§ 7º A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no [art. 345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral.

§ 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no [art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral.

§ 9º Caso a decisão de que trata o § 2º não seja prolatada em 72 (setenta e duas) horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de Juiz auxiliar. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos

Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.

§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.

§ 2º Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.

§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem: [\(Redação dada pela Lei nº 12.976, de 2014\)](#)

I - para as eleições de que trata o [inciso I do parágrafo único do art. 1º](#), Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, Presidente e Vice-Presidente da República; [\(Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014\)](#)

II - para as eleições de que trata o [inciso II do parágrafo único do art. 1º](#), Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito. [\(Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014\)](#)

§ 4º A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 5º Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o § 4º. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 6º Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 7º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 8º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. [\(Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002\)](#)

Art. 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#) [\(Promulgação de partes veto\)](#) [\(Vide ADIN Nº 5.889\)](#)

Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#) [\(Promulgação de partes veto\)](#) [\(Vide ADIN Nº 5.889\)](#)

Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.

Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.

Art. 61A. [\(Revogada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o [art. 148, § 1º Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação.

Das Mesas Receptoras

Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas.

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo.

§ 2º Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de dezoito anos.

Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.

Da Fiscalização das Eleições

Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.

§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados.

§ 4º Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 (dois) fiscais de cada partido ou coligação por seção eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. [\(Redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002\)](#)

§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1º, serão eles apresentados, para análise, aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até vinte dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 3º No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação referida no § 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o § 3º, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados. [\(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003\)](#)

§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no § 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. [\(Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002\)](#)

§ 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002\)](#)

§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização. [\(Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002\)](#)

Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético.

Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados.

§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a expedição.

§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.

Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação.

Art. 70. O Presidente da Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na [Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral.

Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada.

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna.

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:

- I - obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;
- II - desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;
- III - causar, propositalmente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes.

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

- I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
- II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
- III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
- IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
- V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

- a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
- b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
- c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
- d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
- e) a transferência ou remoção *ex officio* de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
- VI - nos três meses que antecedem o pleito:
 - a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
 - b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
 - c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; ([Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015](#))

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

§ 2º A vedação do inciso I do *caput* não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.

§ 3º As vedações do inciso VI do *caput*, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do *caput* e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. ([Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009](#))

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.

§ 7º As condutas enumeradas no *caput* caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o [art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992](#), e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário ([Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995](#)) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. [\(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006\)](#)

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do [art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#), e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no [art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#), a infringência do disposto no [§ 1º do art. 37 da Constituição Federal](#), ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado.

§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá *ex officio* à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.

§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.

§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

Disposições Transitórias

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica.

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas que puder registrar.

Art. 81. [\(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta Lei e as pertinentes da [Lei 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral.

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas seguintes.

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigirá-se à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela.

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por seção, para garantir o pleno exercício do direito de voto.

Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato.

Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, a distância não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.

§ 1º O não-atendimento ao disposto no *caput* enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim.

§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após sua expedição.

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR.

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.

§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.

Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:

I - o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração;

II - ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral.

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.

Disposições Finais

Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais.

§ 2º Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.

Art. 90-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição.

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR.

Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correção das Zonas Eleitorais sempre que:

I - o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do ano anterior;

II - o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade superior a setenta anos do território daquele Município;

III - o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere o art. 36 e nos três dias anteriores à data do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juizes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de *habeas corpus* e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

§ 5º Nos Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais: (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

I - fornecer informações na área de sua competência; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

II - ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Art. 94-B. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Art. 95. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

I - aos Juizes Eleitorais, nas eleições municipais;

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juizes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.

§ 4º Os recursos contra as decisões dos juizes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.

§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas.

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.

§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.

§ 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via fac-símile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de quarenta e oito horas, a contar do recebimento do fac-símile. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.

§ 1º É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta Lei pelos juizes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º No caso de descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. [\(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei. [Regulamento](#)

§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que: [\(Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017\)](#)

I – (VETADO); [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

II – a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,8 (oito décimos) do resultado da multiplicação de 100% (cem por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o § 2º-A; [\(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

III – o valor apurado na forma do inciso II poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido. [\(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

§ 2º (VETADO) [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 2º-A. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte: [\(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

I – deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 0,8 (oito décimos) da soma dos respectivos preços constantes da tabela

pública de veiculação de publicidade; [\(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

II – a variação percentual apurada no inciso I deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso II do § 1º. [\(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

§ 3º No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso II do § 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). [\(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010\)](#)

Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. [\(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o **caput**, o disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. [\(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

Art. 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - em Municípios com até 30.000 (trinta mil) eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - nos demais Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I, acrescido de 1 (uma) contratação para cada 1.000 (mil) eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil). [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a: [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

I - Presidente da República e Senador: em cada Estado, o número estabelecido para o Município com o maior número de eleitores; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

II - Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do **caput**; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

III - Deputado Federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso II do **caput**, considerado o eleitorado da maior região administrativa; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

IV - Deputado Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Federais; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do **caput**; [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do **caput**, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Estaduais. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 2º Nos cálculos previstos nos incisos I e II do **caput** e no § 1º, a fração será desprezada, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 3º A contratação de pessoal por candidatos a Vice-Presidente, Vice-Governador, Suplente de Senador e Vice-Prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 4º [\(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015\)](#)

§ 5º O descumprimento dos limites previstos nesta Lei sujeitará o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

§ 6º São excluídos dos limites fixados por esta Lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. [\(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013\)](#)

Art. 101. (VETADO)

Art. 102. O parágrafo único do art. 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

"Art. 145.....

Parágrafo único.....

IX - os policiais militares em serviço."

Art. 103. O art. 19, **caput**, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juizes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

....."

Art. 104. O art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

"Art. 44.....

.....

§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993."

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. [\(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.

§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

§ 3º Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na [Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#). [\(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009\)](#)

Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 107. Revogam-se os [arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333](#) e o [parágrafo único do art. 106 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#) - Código Eleitoral; o [§ 4º do art. 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995](#); o [§ 2º do art. 50](#) e o [§ 1º do art. 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995](#); e o [§ 2º do art. 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967](#).

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Iris Rezende

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.10.1997

Anexo

Sigla e nº do Partido/série	nome do partido
Recebemos de	Recibo Eleitoral
Endereço:	U.F. [R\$]
Mun., CEP	Município [UFIR]
CPF ou CGC nº	Valor por extenso
a quantia de R\$	em moeda corrente
correspondente a UFIR	doação para campanha eleitoral das eleições municipais
Data / /	Data / /
Nome do Responsável	(Assinatura do responsável)
CPF nº	Nome do Resp.
	CPF Nº
	Série: sigla e nº do partido/ numeração seqüencial

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

(Modelo 1)

Nome: _____ Nº _____

Nº do

CPF: _____

Nº da

Identidade: _____ Órgão

Expedidor: _____

Endereço

Residencial: _____ Telefone: _____

Endereço

Comercial: _____ Telefone: _____

Partido

Político: _____

Comitê

Financeiro: _____

Eleição: _____

Circunscrição: _____

Conta Bancária nº:

Banco: _____ Agência: _____

Limite de Gastos em REAL: _____

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: _____ Nº _____

Nº do

CPF: _____

Nº da

Identidade: _____ Órgão

Expedidor: _____

Endereço

Residencial: _____ Telefone: _____

Endereço
Comercial: _____

Telefone: _____

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA _____

ASSINATURA _____

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**a) - DADOS DO CANDIDATO****1 - Nome** - informar o nome completo do candidato;**2 - Nº** - informar o número atribuído ao candidato para concorrer às eleições;**3 - Nº do CPF** - informar o número do documento de identificação do candidato no Cadastro de Pessoas Físicas;**4 - N º da Identidade** - informar o número da carteira de identidade do candidato;**5 - Órgão Expedidor** - informar o órgão expedidor da Carteira de Identidade;**6 - Endereço Residencial** - informar o endereço residencial completo do candidato;**7 - Telefone** - informar o número do telefone residencial do candidato, inclusive DDD;**8 - Endereço Comercial** - informar o endereço comercial completo do candidato;**9 - Telefone** - informar o número do telefone comercial do candidato, inclusive DDD;**10 - Partido Político** - informar o nome do partido político pelo qual concorre às eleições;**11 - Comitê Financeiro** - informar o nome do comitê financeiro ao qual está vinculado o candidato;**12 - Eleição** - informar a eleição para a qual o candidato concorre (cargo eletivo);**13 - Circunscrição** - informar a circunscrição à qual está jurisdicionado o Comitê;**14 - Conta Bancária Nº** - informar o número da conta-corrente da campanha, caso tenha sido aberta pelo Candidato;**15 - Banco** - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco onde abriu a conta-corrente;**16 - Agência** - informar a agência bancária onde foi aberta a conta-corrente;**17 - Limite de Gastos em REAL** - informar, em REAL, o limite de gastos estabelecidos pelo Partido;**b) DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA****1 - Nome** - informar o nome do Responsável indicado

pelo candidato para
administrar os recursos de
sua campanha;

2 - Nº do CPF - Informar o número do documento de identificação do Responsável no Cadastro de Pessoas Físicas;

3 - N° da Identidade -
informar o número da carteira
de identidade do
Responsável;

4 - Órgão Expedidor -
informar o órgão expedidor
da Carteira de Identidade;

5 - **Endereço Residencial** -
informar o endereço
residencial completo do
Responsável;

6 - **Telefone** - informar o número do telefone residencial, inclusive DDD;

7 - Endereço Comercial -
informar o endereço
comercial completo do
Responsável;

8 - **Telefone** - informar o número do telefone comercial, inclusive DDD;

9 - indicar local e data do preenchimento;

10 - assinaturas do Candidato e do Responsável pela Administração Financeira da Campanha.

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS RECEBIDOS

(Modelo 2)

Direção Nacional/Estadual do
Partido/Comitê
Financeiro/Candidato

Eleição:	UF/MUNICÍPIO
----------	--------------

[illegible]

LOCAL _____ DATA ____ / ____ / ____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - DIREÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DO PARTIDO/COMITÊ FINANCEIRO/CANDIDATO - informar o nome de quem está apresentando a Demonstração: se Direção Nacional do partido político, Direção Estadual, Comitê Financeiro ou Candidato;

2 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);

3 - UF/MUNICÍPIO - informar a Unidade da Federação e Município;

4 - DATA - informar a data em que os Recibos Eleitorais foram recebidos, no formato dia, mês e ano;

5 - NUMERAÇÃO - informar a numeração e série dos Recibos Eleitorais Recebidos;

6 - QUANTIDADE - informar a quantidade de Recibos Eleitorais Recebidos;

7 - RECEBIDOS DE - informar o nome do Órgão repassador dos Recibos;

8 - indicar local e data do preenchimento;

9 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS

(Modelo 3)

Direção Nacional do
Partido/Estadual/Comitê/Candidato

Eleição _____ UF/MUNICÍPIO _____

DATA	NÚMERO DOS RECIBOS	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR/CONTRIBUINTE	CGC/CPF	VALORES	
					UFIR	R\$
TOTAL/TRANSPORTAR						

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA _____ ASSINATURA _____

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - Direção Nacional do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem está apresentando a Demonstração: se Direção Nacional/Estadual do partido político, Comitê ou Candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);

3 - UF/MUNICÍPIO - informar a Unidade da Federação e Município;

4 - DATA - informar a data em que a doação/contribuição foi recebida, no formato dia, mês e ano;

5 - NÚMERO DOS RECIBOS - informar a numeração e série dos Recibos Eleitorais entregues aos doadores/contribuintes;

6 - ESPÉCIE DO RECURSO - informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente ou estimável em dinheiro;

7 - DOADOR/CONTRIBUINTE - informar o nome completo de quem doou os recursos, inclusive no caso de recursos próprios do candidato;

8 - CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/contribuinte, conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física;

9 - VALORES

9-a - UFIR - informar o valor das arrecadações em UFIR, dividindo o valor em R\$ pelo valor da UFIR do mês da doação em moeda corrente;

9-b - R\$ - informar o valor da doação em moeda corrente;

10 - TOTAL/TRANSPORTAR - informar o total em UFIR e R\$ dos valores arrecadados;

11 - indicar local e data do preenchimento;

12 - assinatura dos responsáveis.

RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS

(Modelo 4)

Direção Nacional/Estadual do
Partido/Comitê/Candidato

Eleição

UF/MUNICÍPIO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO EMITENTE/DOADOR		IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE				VALORES
	NOME	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO	Nº BCO	Nº AG.	Nº CHEQUE	R\$
TOTAL/TRANSPORTAR							

LOCAL DATA / /

ASSINATURA _____ ASSINATURA _____

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - DIREÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DO PARTIDO/COMITÊ FINANCEIRO/CANDIDATO - informar o nome de quem está apresentando a Demonstração: se Direção Nacional/Estadual do Partido Político, Comitê ou Candidato;

2 - ELEIÇÃO - Informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);

3 - UF/MUNICÍPIO - Informar a Unidade da Federação e Município;

4 - DATA DO RECEBIMENTO -
informar a data em que os cheques
foram recebidos, no formato dia,
mês e ano:

5 - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE/DOADOR

5-a - NOME - informar o nome do emitente do cheque;

5-b - CGC/CPF - informar o número do CGC ou CPF do emitente do cheque, conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física;

6 - IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE

6-a - DATA DA EMISSÃO - informar a data em que o cheque foi emitido pelo doador, no formato dia, mês e ano;

6-b - Nº DO BANCO - informar o número do Banco sacado;

6-c - Nº DA AGÊNCIA - informar o número da Agência;

6-d - Nº DO CHEQUE - informar o número do cheque;

7 - VALORES - R\$ - informar o valor dos cheques em moeda corrente;

8 - TOTAL/TRANSPORTAR -
informar o total em R\$ dos
Cheques recebidos.

9 - indicar local e data do preenchimento;

10 - assinatura dos responsáveis.

MODELO 5

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

PARTIDO/COMITÊ/CANDIDATO:	
ELEIÇÃO:	UF/MUNICÍPIO
TÍTULO DA CONTA	TOTAL -R\$
1 - RECEITAS	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
Recursos Próprias	

Recursos de Pessoas Físicas			
Recursos de Pessoas Jurídicas			
Transferências Financeiras Recebidas			
FUNDO PARTIDÁRIO			
Cotas Recebidas			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Variações Monetárias Ativas			
Rendas de Aplicações			
OUTRAS RECEITAS			
Vendas de Bens de Uso			
	F.PARTIDÁRIO	O. RECURSOS	TOTAL - R\$
2 - DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Encargos Sociais			
Impostos			
Aluguéis			
Despesas de Viagens			
Honorários Profissionais			
Locações de Bens Móveis			
Despesas Postais			
Materiais de Expediente			
Despesas com Veículos			
Propagandas e Publicidade			
Serviços Prestados por Terceiros			
Cachês de Artistas ou Animadores			
Materiais Impressos			
Lanches e Refeições			
Energia Elétrica			
Despesas de Manutenção e Reparo			
Montagem de Palanques e Equipamentos			
Despesas com Pesquisas ou Testes Eleitorais			
Despesas de Eventos Promocionais			
Despesas Financeiras			
Produção Audiovisuais			
Outras Despesas			
3 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS			
4- IMOBILIZAÇÕES - TOTAL			
Bens Móveis			
Bens Imóveis			
SALDO (+1-2-3-4=5) TOTAL			
Saldo em Caixa			
Saldo em Banco			
Banco (...)			

Obs.: As Obrigações a Pagar deverão ser deduzidas dos saldos financeiros (caixa e banco), sendo demonstradas mediante Demonstração de Obrigações a Pagar (Modelo 11) devidamente assinada pelo Tesoureiro.

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ FINANCEIRO

(MODELO 6)

Partido: _____

Direção/Comitê
Financeiro/Candidato: _____ Único?

Sim: _____ Não: _____

Eleição: _____
UF/Município: _____Número da Conta
Bancária: _____ Banco: _____ Agência

Endereço: _____

NOME DOS MEMBROS	FUNÇÕES

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - NOME DO PARTIDO - informar o nome do partido político;

2 - DIREÇÃO/COMITÊ/CANDIDATO - informar se é da Direção Nacional/Estadual/Comitê Financeiro ou Candidato;

2-a - ÚNICO? SIM? NÃO? - marcar um X no campo correspondente, conforme se trate, no caso de Comitê Estadual/Municipal, de Comitê Único do Partido para as eleições de toda a circunscrição ou de Comitê específico para determinada eleição;

3 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);

4 - UF/MUNICÍPIO - informar a Unidade da Federação e Município;

5 - CONTA BANCÁRIA - informar o número da conta-corrente do Comitê Financeiro;

6 - BANCO - informar o banco onde foi aberta a conta-corrente do Comitê;

7 - AGÊNCIA - informar a agência bancária;

8 - NOMES DOS MEMBROS - informar o nome completo dos membros do Comitê Financeiro;

9 - FUNÇÕES - informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles exercidas, na mesma ordem da citação dos nomes;

10 - indicar local e data do preenchimento;

11 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS

(Modelo 7)

Nome do Partido: _____

Direção/Comitê
Financeiro/Candidato: _____

ELEIÇÃO

CANDIDATO		LIMITE EM R\$
NOME	NÚMERO	
TOTAL / TRANSPORTAR		

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- 1 - NOME DO PARTIDO - informar o nome do partido político;
- 2 - COMITÊ FINANCEIRO/DIREÇÃO/CANDIDATO - informar o nome: se da direção Nacional/Estadual, do Comitê e Candidato que está apresentando a Demonstração;
- 3 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
- 4 - CANDIDATO
- 4-a - NOME - informar o nome completo do Candidato;
- 4-b - NÚMERO - informar o número atribuído ao candidato, com o qual concorre à eleição;
- 5 - LIMITE EM R\$ - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído ao Candidato, pelo partido;
- 6 - TOTAL / TRANSPORTAR - informar o total em REAL;
- 7 - indicar o local e a data do preenchimento;
- 8 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUÍDOS

(Modelo 8)

Direção Nacional/Estadual/Comitê Financeiro: _____

Eleição: _____

DATA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	DISTRIBUÍDO A

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- 1 - DIREÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DO PARTIDO/COMITÊ FINANCEIRO - informar o nome de quem está apresentando a Demonstração: se Direção Nacional/Estadual do Partido Político ou Comitê Financeiro;
- 2 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
- 3 - DATA - informar a data da entrega dos Recibos Eleitorais, no formato dia, mês e ano;
- 4 - NUMERAÇÃO - informar a numeração dos Recibos Eleitorais Distribuídos, inclusive com a sua série;
- 5 - QUANTIDADE - informar a quantidade de Recibos Eleitorais Distribuídos, separados por valor de face;
- 6 - DISTRIBUÍDO A - informar o nome da Direção (Nacional/Estadual) ou do Comitê ou Candidato que recebeu os Recibos Eleitorais;
- 7 - indicar local e data do preenchimento;
- 8 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Direção Nacional/Estadual do
Partido / Comitê
Financeiro: _____

DATA	NOME DO PARTIDO/COMITÊ/CANDIDATO BENEFICIÁRIO	VALORES R\$
TOTAL / TRANSPORTAR		

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - DIREÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DO PARTIDO / COMITÊ FINANCEIRO - informar o nome de quem realizou as transferências: se Direção Nacional/Estadual do Partido ou Comitê Financeiro, inclusive no caso de coligações;

2 - DATA - Informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mês e ano;

3 - NOME DO PARTIDO / COMITÊ / CANDIDATO -informar o nome do Partido (Direção Nacional/Estadual) do Comitê ou do Candidato beneficiário da transferência dos recursos, inclusive no caso de coligações;

4 - VALORES - R\$ - informar o valor das transferências em moeda corrente;

5 - TOTAL / TRANSPORTAR -
informar o total e em R\$ das
transferências efetuadas;

6 - indicar local e data do preenchimento;

7 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

(Modelo 10)

Nome do Partido:

Direção Nacional:

COMITÊS FINANCEIROS VINCULADOS	VALORES R\$		
	ARRECADADOS	APLICADOS	SALDOS
TOTAIS/TRANSPORTAR			

LOCAL _____ DATA _____ / _____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - NOME DO PARTIDO - informar o nome do partido político;

2 - COMITÊS FINANCEIROS VINCULADOS - informar o nome da Direção Estadual ou Comitês Estadual ou Municipal vinculados à Campanha para Prefeito;

3 - VALORES/R\$

3 -a - ARRECADADOS - informar o total, em moeda corrente, dos valores arrecadados para cada Comitê;

3 -b - APLICADOS - informar o total, em moeda corrente, dos valores aplicados para cada comitê;

3 -c - SALDOS - Informar os saldos financeiros apresentados, de cada Comitê.

4 - TOTAIS/TRANSPORTAR - informar os totais dos recursos arrecadados, aplicados e dos respectivos saldos, representando o movimento financeiro de toda a campanha para Prefeito;

5 - Indicar o local e data do preenchimento;

6 - assinatura dos responsáveis.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO LIMITE DE GASTOS

(Modelo 11)

Direção Nacional do Partido Político:

[illegible]

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - DIREÇÃO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO - informar o nome do partido político;

2 - Nº - informar o número com o qual o Partido Político concorreu às eleições;

3 - CIRCUNSCRIÇÃO - informar a circunscrição em relação à qual foi estabelecido o limite de gastos;

4 - VALORES REAL - informar o valor em REAL do limite de gastos atribuído pelo Partido, para cada circunscrição;

5 - TOTAL / TRANSPORTAR -
informar o total em REAL:

6 - indicar local e data do preenchimento;

7 - assinaturas dos responsáveis.

BIODATA PENULIS



NURUL KHALIFAH, lahir pada tanggal 5 Mei 2002, di Makassar. Anak pertama dari enam bersaudara oleh pasangan Bapak Tamsul dan Ibu Yuliati. Memulai pendidikan pada tingkat kanak-kanak di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SD Negeri 6 Pinrang pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 pindah pendidikan di SDN 029 INP.

Sumberjo dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Wonomulyo pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di MAN 2 Kota Parepare pada tahun 2018 dan tamat pada tahun 2020. Melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menyelesaikan studi perkuliahan sebagaimana mestinya. Serta mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Kesiapan Sistem *E-Voting* pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem *E-Voting* Brazil”**.